

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) SAPEU PAKAT
DI GAMPONG ALUE SUNGAI PINANG KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**(Studi Di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**SRI NOVI SULVIA
NIM . 150802041**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SRI NOVISULVIA

NIM. 150802041

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta diterima Sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

SRI NOVI SULVIA

NIM: 150802041

Pada Hari/Tanggal

Senin 23 Desember 2019 M

26 Rabiul Akhir 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Sidang Munaqsyah

Ketua,



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Sekretaris,



Siti Nur Zafikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji I,



Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si, M.Ed
NIP. 197810162008011011

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry**



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Novi Sulvia
NIM : 150802041
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan pihak lain.

Banda Aceh, 11 Januari 2020

Yang menyatakan,




SRI NOVI SULVIA
NIM. 150802041

ABSTRAK

BUMDes di Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Tujuan pembentukan BUMG adalah untuk meningkatkan perekonomian melalui berbagai kegiatan ekonomi. Namun dalam kenyataannya, masih banyak gampong yang belum berhasil dalam menjalankan BUMG. Hal ini disebabkan karena masih banyak gampong yang belum siap, kurangnya kompetensi Sumber daya manusia, tidak adanya kemampuan pengelola dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh gampong, dan usaha yang dijalankan belum memberikan dampak yang berarti untuk masyarakat. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Terdapat 6 indikator dalam penelitian ini, yaitu pertama yaitu memulai bisnis, kedua pengelolaan organisasi BUMG, pengelolaan pemasaran BUMG, pengelolaan proses produksi BUMG, pengelolaan keuangan BUMG, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih terdapat kekurangan dari segi perencanaan unit usaha. BUMG memasarkan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait barang dan jasa yang disediakan masyarakat mengetahui hal tersebut melalui informasi dari mulut ke mulut, BUMG belum memasarkan atau memperkenalkan produk dengan menggunakan spanduk, baliho dan lain-lain. Dalam pengelolaan produksi pada BUMG Alue Sungai Pinang lebih mengarah pada perawatan barang yang disediakan oleh BUMG, untuk setiap perawatan dan mengganti kerusakan barang milik BUMG menjadi tanggung jawab bagi pemakai atau penyewa barang tersebut. Terkait pengelolaan keuangan BUMG masih menggunakan pembukuan manual, dengan ketentuan pembagian hasil usaha 60 % untuk gampong dan 40% untuk BUMG. Dalam pengelolaan Sumber daya manusia, pengelola atau pengurus BUMG masih kekurangan pelatihan atau bimbingan, yang tentunya akan mempengaruhi keberhasilan BUMG. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, secara umum pengelolaan BUMG sudah terlaksana dengan baik, namun belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa kelemahan dalam setiap indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang, dan masih terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG seperti BUMG kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah gampong yang mengakibatkan masyarakat belum antusias terhadap BUMG.

Keyword: Pengelolaan, BUMDes, BUMG

KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana oleh karena-Nya telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul *Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sapeu pakat di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya*. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menggerakkan misi besar Islam yaitu *Dinnul Islam*, agama yang rahmatan lil'alamin. Semoga dengan bacaan shalawat senantiasa kita semua mendapatkan *syafa'atnya* di *yaumul kiamah*.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar, S.IP.,M.Soc, Sc Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa.
3. Dr. Mahmuddin, M.Si, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran-saran dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.

4. Siti Nur Zalikha, M.Si, sebagai Pembimbing II, yang telah bersedia menyampaikan masukan-masukan dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak serta ibu Dosen dan karyawan-karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi.
6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayah (Rusli) dan ibu tercinta (Siti Sara), serta kakak saya Rina Hariyanti dan abang Taslim Zulfadhli. Terima kasih atas doa, bimbingan, dukungan dan nasihat yang telah di berikan sehingga saya menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih untuk kesempatan dan amanat yang telah di berikan kepada saya untuk menyelesaikan studi ku hingga memiliki gelar Sarjana Administrasi Publik. Semoga dengan gelar S.AP ini saya dapat membahagiakan Ayah dan Ibu. Aamiin.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara leting 2015.
8. Terima kasih kepada anak tetangga saya yang bernama Hasatirul Auwa yang selalu setia menemani saya selama penelitian, dengan setia mendorong motor yang kehabisan bensin.

Banda Aceh, 11 Januari 2020

Sri Novi Sulvia

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori	7
1. Teori Manejemen.....	7
2. Teori Organisasi	11
3. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).....	17
4. Konsep Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	18
5. Indikator Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .	19
B. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Visi dan Misi Gampong.....	37
C. Gambaran BUMG <i>Sapeu Pakat</i>	38
D. Struktur Pengelola BUMG <i>Sapeu pakat</i>	43
E. Hasil Penelitian	44
1. Pengelolaan BUMG <i>Sapeu Pakat</i>	44
2. Memulai Bisnis BUMG.....	46
3. Memulai Organisasi BUMG.....	49

4. Mengelola Pemasaran BUMG	52
5. Mengelola Proses Produksi BUMG	56
6. Mengelola Keuangan BUMG	57
7. Mengelola Sumber Daya Manusia	65
8. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan BUMG	67
BAB V KESIMPULAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	

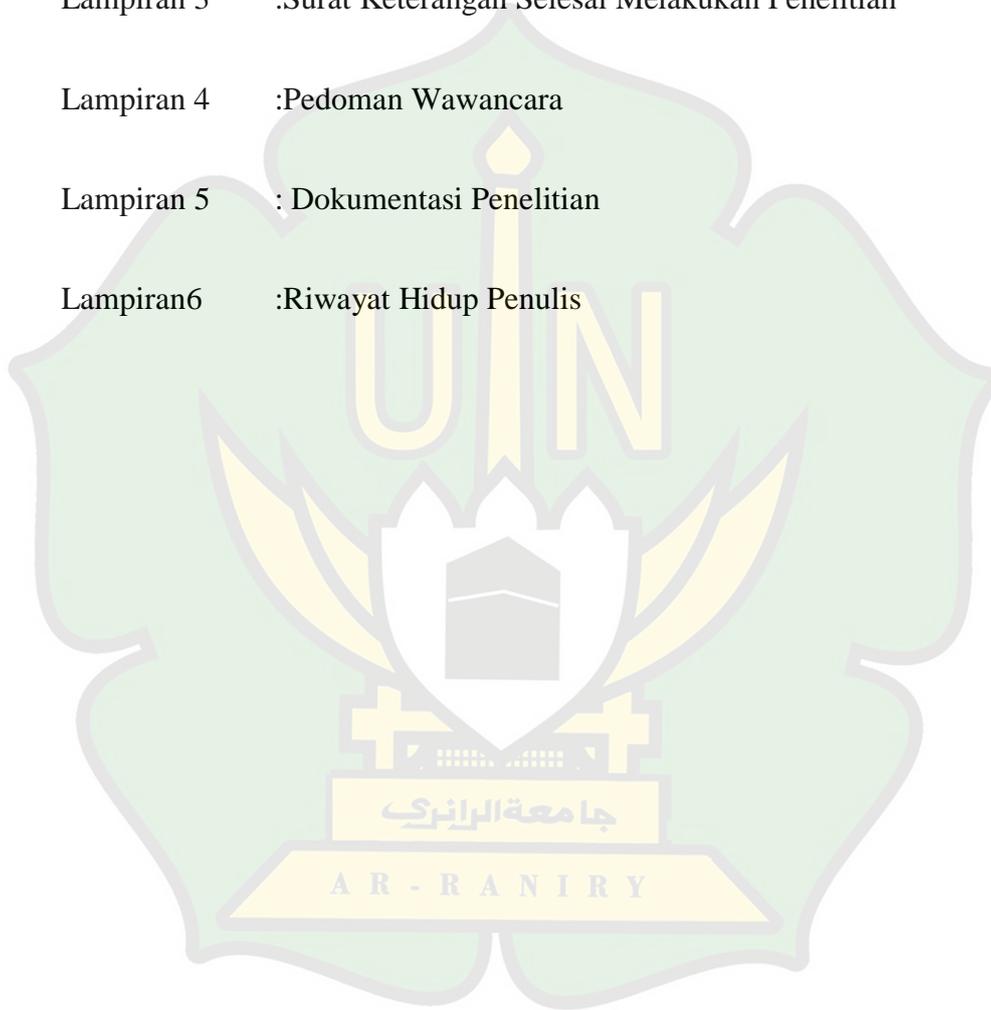


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	26
Tabel 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan BUMG.....	26
Tabel 3.3. Informan Penelitian.....	27
Tabel 4.1. Batas Wilayah Administrasi Gampong.....	32
Tabel 4.2. Potensi Sumber Daya Alam	33
Tabel 4.3. Perkembangan Jumlah Penduduk	34
Tabel 4.4. Jenis Mata Pencaharian.....	35
Tabel 4.5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah	36
Tabel 4.6. Daftar Unit Usaha BUMG	39
Tabel 4.7. Pengelola BUMG <i>Sapeu pakat</i>	43
Tabel 4.8. Laporan Keuangan BUMG <i>sapeu pakat</i> tahun 2017.....	60
Tabel 4.9. Laporan Keuangan BUMG <i>sapeu pakat</i> tahun 2018.....	60
Tabel 4.10. Laporan Keuangan BUMG <i>sapeu pakat</i> tahun 2019.....	63
Tabel 4.11 Laporan Laba Bersih BUMG.....	63
Tabel 4.12. Tingkat Pendidikan Pengelola BUMG	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah unit terkecil dari struktur pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sosiologis maupun politis keberadaan desa ada pada posisi yang cukup strategis, mengingat posisinya paling dekat dengan masyarakat.¹ Menurut prospek sejarah politik hukum tentang Desa dari masa ke masa kurang lebih enam dasawarsa lamanya.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan hak beserta kewenangan kepada pemerintah desa dalam menata dan mengelola desa berdasarkan kebijakan pemerintah desa. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar dapat di realisasikan dengan cepat. Sebelumnya desa hanya menjadi objek kebijakan, namun kini juga menjadi subjek kebijakan, setelah diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini adalah bentuk perwujudan pembangunan otonomi Daerah agar tidak adanya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan.

Melalui skema Dana Desa (DD) inilah, setiap desa mempunyai harapan dan peluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa dengan mandiri melalui pemanfaatan Dana Desa. Pada peraturan perundang-undangan telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan

¹ Kushandajani. 2018. Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (dalam perspektif UU. NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Semarang, Hal : 1

kepada desa yang kini dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan pemerintah pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat empat program prioritas ADD yaitupenerapan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADES), pembangunan embung desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta membangun sarana dan prasarana olahraga desa.²Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan tujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi yang ada di desa, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di kelola oleh desa atau kerja sama antar desa, dapat diwadahi oleh keberadaan BUMDes. BUMDes bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan segala potensi yang ada pada desa. Potensi peluang dan kapasitas yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes. Oleh masing-masing desa yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes.³

BUMDes di Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG di gampong Alue Sungai Pinang berdiri sejak tahun 2015 setelah penetapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Dr.Ibrahim,M.Sc. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kawasan Tambang. PT Leutika Nouvalitera. Yogyakarta, Hal : 17

2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pendirian BUMG di Gampong Alue Sungai Pinang berdasarkan pertimbangan aparaturnya gampong dan inisiatif masyarakat, untuk pengelolaan serta pengembangan potensi gampong. Berdasarkan berita yang bersumber dari Serambinews (2019), BUMG Alue Sungai Pinang menjadi salah satu dari 8 (delapan) BUMG yang dinilai oleh Tim Kabupaten ABDYA, kegiatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-17 Kabupaten Aceh Barat Daya.⁴

Gampong Alue Sungai Pinang memiliki salah satu potensi sumber daya alam yaitu buah pala, hal ini disebabkan karena letak gampong secara geografis berada di dataran tinggi yang merupakan kawasan pegunungan pala. Rata-rata penduduk gampong bekerja sebagai petani pala yang sekaligus menjadi penghasil minyak pala.

Penduduk gampong juga memproduksi kue pala dan sirup pala. Namun usaha tersebut merupakan usaha rumahan yang di produksi oleh ibu-ibu rumah tangga, tidak ada wadah usaha yang didirikan khusus untuk menekuni usaha tersebut. Potensi yang ada pada buah pala tersebut seharusnya dapat dikembangkan melalui BUMG, dengan inilah BUMG dapat hadir dan mengembangkan dirinya sebagai sebuah usaha berbasis potensi asli gampong sekaligus memastikan bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaatnya.

BUMG di gampong Alue Sungai Pinang justru mengembangkan jenis usaha lain seperti, kursus menjahit bagi kaum wanita, depot

⁴ Serambinews, Rabu 10 April 2019 “Tim Kabupaten Nilai Delapan Gampong di Abdya, Kecamatan Babahrot Tidak Ada Wakil”

airminum, penyewaan molen (mesin pengaduk semen), penyewaan sawah untuk masyarakat gampong, penyewaan perkakas pesta seperti pelaminan dan teratak.

Program, kursus menjahit ini diperuntukkan bagi ibu-ibu dan kaum perempuan, program kursus menjahit lebih memfokuskan untuk pengembangan keterampilan menjahit para ibu-ibu. Keberadaan BUMG di gampong ini tidak semua masyarakat mengetahuinya, dan tidak semua masyarakat paham tentang apa itu BUMG dan apa saja keuntungannya bagi mereka. Terkait laporan keuangan BUMG menurut Peraturan Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pasal 12 “seluruh unit-unit usaha BUMDes harus membuat laporan keuangan setiap bulan”. Namun, dalam realita dilapangan BUMG belum menerapkan hal tersebut. Hal ini didapat pada saat peneliti melakukan observasi awal di lapangan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pengelolaan BUMG di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampoeng Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di angkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong *sapeu pakat* di gampong Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG *sapeu pakat*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan BUMG di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG di gampong Alue Sungai Pinang kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya ?

D. Manfaat Penelitian

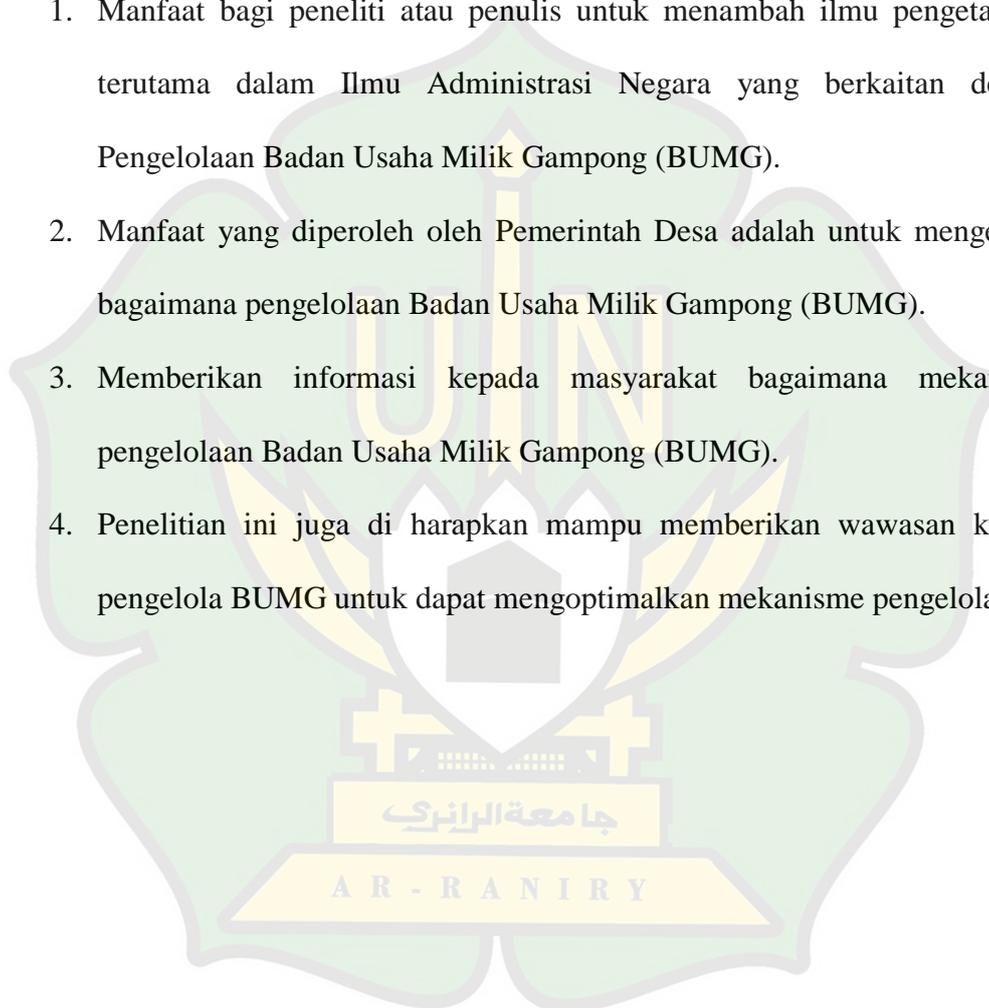
1.1.1. Secara teoritis

1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang kajian Ilmu Administrasi Negara.

2. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa mendatang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.1.2. Secara praktis

1. Manfaat bagi peneliti atau penulis untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
2. Manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah Desa adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
3. Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
4. Penelitian ini juga di harapkan mampu memberikan wawasan kepada pengelola BUMG untuk dapat mengoptimalkan mekanisme pengelolaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Manajemen

Manajemen merupakan sebuah proses bimbingan, pimpinan, pengaturan, pengendalian dan pemberian fasilitas lainnya. Apabila kita menoleh ke belakang pada zaman penjajahan Belanda dan melihat bagaimana sejarah bangsa Indonesia, manajemen sudah dikenal dan sudah ada sejak dahulu kala.⁵ Tidak adanya keseimbangan antara pengembangan teknis dengan kemampuan sosial di tengah masyarakat, menjadi penyebab munculnya konsep manajemen. Kebangkitan pada teoretis maupun para praktisi sudah mulai tampak pada Abad ke-20.⁶

Manajemen berasal dari kata *to manage*, yang artinya mengatur, mengelola atau mengendalikan. Berdasarkan arti tersebut secara substantif, makna manajemen memiliki unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Kata manajemen juga di ambil dari bahasa Prancis kuno *menegement*, yang memiliki arti sebagai seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen adalah “ sebuah karya seni dalam melakukan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti seseorang yang mengarahkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai tujuan”.⁷

⁵ Abdurrahmat Fathoni, 2006. Organisasi dan Manejemen Sumber Daya Manusia. PT Rineka Cipta. Jakarta, Hal: 5

⁶ Dr.H.B.Siswanto, M.SI. 2014. Pengantar Manajemen. PT Bumi Aksara. Jakarta, Hal: 1

⁷ Prof. Dr. H Juhaya S. Praja,M.A.2014. Manajemen Perusahaan. CV Pustaka setia. Bandung, Hal: 13

Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di rencanakan, kemudian diselenggarakan dan dikendalikan. Dalam pengertian tersebut, manajemen merupakan gabungan dewan manajer (dua atau lebih) dalam menetapkan kebijakan dalam berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan definisi tersebut ada beberapa hal dasar yang merupakan inti dari manajemen yaitu *Pertama*, manajemen selalu mempunyai tujuan tertentu. Berhasil atau tidaknya tujuan yang telah di tetapkan sangat tergantung pada manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. *Kedua*, Manajemen tidak dapat dilakukan sendiri, (*performance*) pekerjaan-pekerjaan tertentu hal itu dapat dilaksanakan dengan menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. *Ketiga*, Kecakapan teknis (*technical skill*) dan latar belakang (*back ground*) pengalaman manajemen tidak menjamin seseorang bisa menjadi manajer, tetapi bagaimana ia harus memimpin organisasi dengan tepat dan efektif.⁸

Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Stoner dan Wankel mendefinisikan manajemen sebagai proses yang sistematis dengan mencakup perencanaan (*planning*), yang berarti penetapan target akhir atau tujuan akhir, pengorganisasian (*organizing*) yaitu mengkoordinasikan seluruh anggota organisasi dan sumber daya lain yang dibutuhkan, kepemimpinan (*leading*) yaitu memastikan bahwa anggota organisasi bekerja dengan baik , serta pengendalian (*controlling*) adalah memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Paul Hersey dan Kenneth H.Blanchard menganggap

⁸ Drs. Henki Idris Issakh, MM. 2015. Pengantar Manajemen (Edisi Ke 2). In Media. Hal :

manajemen sebagai kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia baik secara personal atau kelompok guna mencapai target atau tujuan organisasi. Harsey dan Blanchard tidak menitikberatkan definisi tersebut hanya pada satu jenis organisasi saja, akan tetapi bisa diaplikasikan pada jenis-jenis organisasi lainnya.⁹

Terry menyatakan bahwa “manajemen merupakan pemanfaatan sumber daya manusia melalui beberapa proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan”. Robbins, Stephen, dan Coulter menegaskan bahwa “Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Misalnya Koontz dan O’Donnell mengartikan bahwa “Manajemen merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan orang lain”. Selanjutnya, Griffin menyatakan bahwa “manajemen sebagai sebuah proses strategis dan taktik dalam organisasi yang merujuk pada beberapa tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.

Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan waktu pelaksanaannya sesuai dengan jadwal”. Sedangkan pakar lain seperti, Follet mengemukakan bahwa “Manajemen sebagai sebuah karya seni seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain atau pekerjaan yang diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya, menurut Appley (Zailani dan

⁹ Dr. H.B. Siswanto, M.Si. 2013. Pengantar Manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta, Hal:2

Antowijoyo, 1989: 1 “Manajemen adalah suatu kegiatan atau seni dalam mengurus, memimpin, mencapai, memerintah, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan”.¹⁰

Pada dasarnya ketika organisasi menjalankan tujuannya, akan selalu dilakukan sejumlah perencanaan, mengorganisasikan dan pengendalian, dan bahkan mungkin tidak selamanya dalam rangkaian yang berurutan. Oleh sebab itu, manajemen lebih tepat diartikan sebagai rangkaian keputusan dan rangkaian kerja. Menurut Hery terdapat empat fungsi manajemen, diantaranya yaitu:

- a. Fungsi Perencanaan, pada fungsi ini mencakup tentang proses penetapan atau perumusan sasaran, penentuan strategi untuk mencapai tujuan, dan pembuatan rencana untuk menyelaraskan serta mengkoordinasi berbagai kegiatan.
- b. Fungsi pengorganisasian, merupakan fungsi tentang penentuan pekerjaan, cara kerja dan siapa yang akan mengerjakannya, siapa melapor kepada siapa. Fungsi pengorganisasian yaitu merancang pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui penciptaan struktur organisasi.
- c. Fungsi kepemimpinan, dalam organisasi pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para bawahannya untuk memotivasi serta dapat berkomunikasi dengan efektif.
- d. Fungsi pengendalian, merupakan tahap evaluasi guna memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Apa bila terjadi penyimpangan yang begitu signifikan, maka manajemen harus

¹⁰ Dr. H. A. Rusdiana, Drs.,M.M. 2014. Asas-asas manajemen berwawasan global. CV Pustaka setia. Bandung, Hal: 23

memperbaiki agar kegiatan dapat kembali berjalan sesuai dengan rencana awal.¹¹

Pengembangan model fungsi manajemen di atas mengacu kepada pembagian fungsi manajemen menurut seorang pengusaha asal Perancis bernama Henry Fayol pada tahun 1916. Fayol membagi fungsi manajemen ke dalam lima fungsi, yakni: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian comando (*commanding*), pengoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*). Pada perkembangan selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen di susut menjadi empat fungsi, yang mencakup *planning*, *organizing*, *Leading/directing*, dan *controlling*. Berdasarkan berbagai paparan di atas, manajemen dapat di definisikan sebagai “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.¹²

2. Teori Organisasi

Menurut Wexlwy dan Yulk organisasi adalah “kelompok yang terdiri dari beberapa orang dengan pola kerja saling berhubungan dalam mencapai sebuah tujuan”. Tujuan utama terbentuknya organisasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama, dengan penjelasan yang sederhana organisasi adalah alat guna mencapai tujuan.¹³

¹¹ Hery, S.E.,M.Si. 2017. Pengantar Manajemen. Yogyakarta. Gava Media. Hal:8

¹² Ismail Salihin, 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta. Erlangga. Hal : 3

¹³ Chazienul Ulum. *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. 2016. Malang, Hal:14

Menurut Luthan beberapa strategi dalam memperkuat dan mempertahankan organisasi yaitu : seleksi calon karyawan, penempatan, pemahaman bidang kerja, penilaian hasil kinerja serta pemberian *reward*, memahami bagaimana sejarah organisasi serta adanya promosi bagi karyawan. Budaya organisasi yang kuat akan dipengaruhi oleh sikap konsistensi organisasi. Robbins mengemukakan “Organisasi yang kuat akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor penyebaran dengan menggambarkan seberapa kuat karyawan memiliki nilai-nilai yang sama, faktor intensitas yaitu komitmen karyawan yang kuat”.¹⁴

a. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (PERMENDES) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan pengelolaan, Dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa “BUMDes merupakan badan usaha dengan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”.¹⁵

BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk pemerintah desa dan masyarakat mengelola badan usaha tersebut berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dibentuk berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang

¹⁴ Alifiulahtin Utaminingsih. Perilaku Organisasi (Kajian Teoritik dan Empirik Terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen). 2014. Malang, Hal:39-41

¹⁵ Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

berlaku dan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pembentuk BUMDes merupakan salah satu cara memanfaatkan Undang-undang yang telah memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah desa agar dapat melakukan inovasi dalam pembangunan desa, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi mendorong dan menggerakkan perekonomian masyarakat. selain itu, dengan hadirnya BUMDes dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola potensi desa, sehingga terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja.¹⁶

Sebagaimana telah tercantum dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes pada pasal 4 bahwa “Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes di sepakati melalui musyawarah Desa, meliputi : Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat, Organisasi pengelola BUMDes serta modal usaha BUMDes dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Adapun tujuan Pendirian BUMDes antara lain: *Pertama*, meningkatkan perekonomian Desa. *Kedua*, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga. *Ketiga*, pemanfaatan aset Desa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Desa. *Keempat*, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa. *Kelima*, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum bagi warga. *Keenam*, membuka lapangan kerja dan yang terakhir yaitu untuk

¹⁶Yusuf Agunggunanto dkk. 2016. Ejournal.unisnu.ac.id. Edy. Pengembangan Desa mandiri melalui Pengelolaan BUMDes. Universitas Diponegoro Semarang.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui perbaikan pelayanan umum dan pemerataan ekonomi desa.¹⁷

Menurut Ridwan Halim menjelaskan bahwa “badan usaha yaitu perwujudan dari sebuah organisasi yang terorganisir dengan sistem kerja yang sudah terbentuk, yang terdiri dari pengurus dan anggotanya serta memiliki beban kerja dan tanggung jawab masing-masing, dan menghasilkan laba.”¹⁸ Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong menyatakan bahwa “BUMG merupakan salah satu badan usaha perekonomian milik gampong yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah gampong, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan atau sebagian besar merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan Qanun gampong. Pemerintah gampong dapat membentuk BUMG untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli gampong dan meningkatkan perekonomian masyarakat gampong”.¹⁹

Pendirian BUMDes bertujuan sebagai badan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal pada tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa berdasarkan pada potensi desa, kebutuhan masyarakat, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dengan tujuan akhirnya yaitu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Upaya pembangunan di desa menjadi dasar terbentuknya BUMDes yang lebih

¹⁷ Ibid. Pasal 4

¹⁸ AmeliA Sri Kusuma Dewi. 2014 Jurnal.uns.ac.id.. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta menumbuhkan perekonomian Desa” Vol: No 1

¹⁹ Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.²⁰

b. Dasar Hukum Pembentukan BUMDes

Kewenangan dan hak yang diberikan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan untuk desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa. Peluang desa dalam mengelola sumber dayanya dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar desa mandiri untuk mengatur sumber daya.²¹ Secara khusus terkait Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) di atur dalam Peraturan Menteri Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjadi landasan yuridis terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Hal terkait Badan Usaha Milik Desa dijelaskan secara detail dalam PDTT Nomor 4 tahu 2015 , mulai dari proses pendirian, pengelolaan, permodalan, jenis usaha, hingga pembubaran BUMDes.²² Pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Desa dapat membentuk BUMDes berdasarkan pada peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes”

²⁰Ahmad Nur Ihsan.2018. Ejournal3.undip.ac.id “Analisis pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera sebagai penggerak Desa wisata Lerep” Vol :7 No:4

²¹Agus Surono. 2017. [Http://rechtsvinding.bphn.go.id](http://rechtsvinding.bphn.go.id) “Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” Vol: 6, No: 3. ISSN : 2089-9099.

²²Zulkarnaen Ridlwan. 2015. Jurnal.Fh.Unila.ac.id. “Payung Hukum pembentukan BUMDes” ISSN : 1978-5186 Vo. 7 No. 3

c. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Pada hakikatnya kehadiran BUMDes merupakan salah satu bentuk strategi kebijakan yang dapat menghadirkan instansi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di gampong. BUMDes menjadi salah satu wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui pengembangan usaha ekonomi pada tingkat lokal, dengan memposisikan desa sebagai :

- a. Berbasis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, swadaya, gotong royong dan kerja sama secara inklusif.
- b. Pemilik kekuasaan dan pemerintahan mengandung otoritas dan akuntabilitas guna mengurus kepentingan masyarakat
- c. Desa sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu melaksanakan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.²³

BUMDes secara keseluruhan dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan atau pendirian BUMDes. BUMDes terbentuk pula atas inisiatif masyarakat, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa serta kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes mempunyai tujuan yang jelas dan direalisasikan, seperti melalui penyediaan layanan kebutuhan bagi usaha produktif yang diutamakan bagi masyarakat miskin, untuk mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan

²³Siti Nur Zalikha.2018. Jurnal.ar-raniry.ac.id. “Demokrasi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng Provinsi Aceh)” E-ISSN: 2549-6921

uang. Selain itu, tujuan pembentukan BUMDes yaitu untuk menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.²⁴

3. Teori Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan sebuah seni dalam perencanaan, pengarahan, dan evaluasi terhadap sumber daya manusia. Tugas utama manajemen sumber daya manusia yaitu bagaimana cara mengelola manusia secara efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil dan tujuan organisasi yang memuaskan²⁵. Dalam organisasi sumber daya manusia yang tangguh akan mempengaruhi suatu sinergitas dalam organisasi, seta pengambilan keputusan akan menunjukkan kinerja dari sumber daya manusia serta kemampuannya dalam menganalisa permasalahan yang ada lingkup kerja. Wether dan Davis mengemukakan bahwa “sumber daya manusia merupakan manusia yang memiliki kesiapan, kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi”.²⁶

Adapun beberapa pendapat bahwa kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi produktivitas kerja. Manajemen sumber daya manusia terdiri atas perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan serta evaluasi memiliki fokus utama menghasilkan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Terdapat beberapa kegiatan dalam pengembangan SDM, yaitu :Perencanaan serta analisis

²⁴ Edy Yusuf Agunggunanto dkk. 2016. Ejournal.unisnu.ac.id.. Pengembangan Desa mandiri melalui Pengelolaan BUMDes. Universitas Diponegoro Semarang.

²⁵Nuridin Batjo dan Mahadin Shaleh. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2018. Makassar, hal:1-3

²⁶Sukmawati Marjuni. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2015. Makassar, hal:3-5

sumber daya manusia, pesetaraan kesempatan bekerja dan kompensasi dan keuntungan.²⁷

4. Konsep Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

BUMDes di Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan BUMG, menurut Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong merupakan badan perekonomian milik Gampong yang dibentuk dan dimiliki oleh Gampong. Kemudian, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan atau sebagian besar adalah kekayaan milik Gampong yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan Qanun Gampong. Pemerintah Gampong dapat mendirikan BUMG untuk meningkatkan perekonomian sumber-sumber pendapatan asli Gampong serta untuk mengembangkan perekonomian masyarakat gampong.

Secara organisatoris struktur BUMG terpisah dari struktur organisasi pemerintahan Gampong. Pengurus BUMG terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional, penasihat terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Ketua secara ex-officio dijabat oleh Keuchik Gampong dan anggota berasal dari kalangan tokoh masyarakat. Pelaksana operasional terdiri dari manajer dan kepala unit usaha.

²⁷Harsuko Riniwati. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM)*. 2016. Malang, Hal:29

5. Indikator Pengelolaan BUMDes

Dalam mengelola organisasi atau badan usaha tentunya tidak akan terhindar dari yang namanya indikator, misalnya dalam dunia usaha dimana seorang manajer harus mencapai indikator tertentu dalam menjalankannya usahanya, sehingga indikator dijadikan sebagai sebuah tolak ukur untuk melihat keberhasilan usahanya yang dijalankan. Dalam hal ini indikator dijadikan sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan usaha yang dijalankannya. Wilson dan Sapanuchart mengemukakan bahwa “indikator merupakan sebuah ukuran yang ditetapkan dari sebuah kondisi atau keadaan secara tidak langsung. WHO juga menyatakan bahwa indikator ialah variabel yang dapat membantu manusia untuk melakukan pengukuran terhadap sesuatu hal untuk menuju ke perubahan yang lebih baik, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan BUMDes, diantaranya yaitu:

1) Memulai Bisnis BUMDes

Pembentukan BUMDes harus mempunyai visi dan misi yang cukup berani dan kuat, karena visi dan misi akan menjadi penggerak bagi para pendiri BUMDes dan pengelola untuk memulai badan usaha tersebut. BUMDes dimulai melalui sebuah perencanaan, tetapi jika belum memiliki rencana usaha dalam mengembangkan BUMDes, maka pendiri BUMDes dapat mempercepat proses perencanaan dengan menggunakan Kanvas bisnis. Kanvas bisnis merupakan pemikiran dengan ide bisnis yang tidak beraturan menjadi rancangan bisnis terstruktur.

2) Pengelolaan Organisasi BUMDes

Pengelolaan menjadi sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut. Pada tahap ini pengelola BUMDes hanya perlu bertugas memeriksa ulang rencana usaha yang telah dibuat, dengan memastikan bahwa tujuan BUMDes dapat dicapai dengan baik dan memeriksa kembali asumsi-asumsi yang mendasari rencana operasi, pemasaran, keuangan dan SDM telah sesuai dengan kondisi internal serta eksternal BUMDes.

3) Pengelolaan Pemasaran BUMDes

Pengelolaan pemasaran menjadipenentu keberhasilan BUMDes, pemasaran adalah nyawa terhadap berlangsungnya BUMDes. Laba yang diperoleh untuk menutupbiaya-biaya yang telah dikeluarkan merupakan hasil dari kegiatan pemasaran BUMDes. Dalam pengelolaan pemasaran BUMDes, meliputi bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan oleh BUMDes, pengelompokan pasar, penentuan target pasar dihasilkan oleh BUMDes serta bauran pemasaran.

4) Pengelolaan Proses produksi BUMDes

Pengelolaan produksi merupakan proses yang bersifat berkesinambungan secara efektif dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengendalian gunanya adalah untuk mengintegrasikan berbagai sumberdaya secara efisien untuk mencapai tujuan BUMDes. Dalam pengelolaan produksi meliputi, bagaimana

pengelolaan produksi, operasi BUMDes, ketersediaan fasilitas produksi, tempat berjalannya usaha dan penentuan tingkat produksi.

5) Pengelolaan Keuangan BUMDes

Tujuan pengelolaan keuangan BUMDes adalah untuk mengoptimalkan kemakmuran pemerintah Desa dan masyarakat. Manajemen keuangan yang baik berhubungan dengan bagaimana pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi. Apakah investasi tersebut memberikan keuntungan terhadap BUMDes atau tidak. Selain itu, laporan akuntansi keuangan BUMDes harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembukuan akuntansi, serta mengandung asas *transparancy*.

6) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting yang harus dikelola oleh BUMDes. SDM menjadi penggerak kegiatan BUMDes yang harus dikelola secara profesional. Keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM berkualitas yang berada di Desa. Manajemen SDM bisa dimulai dari tahap perencanaan SDM, analisis pekerjaan, rekrutmen (penerimaan karyawan), seleksi, orientasi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).²⁸

²⁸ Sukasmanto. 2014 *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Hal: 1-145

B. Penelitian terdahulu

1. Tedi Kusuma, tahun 2018 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan judul "*Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Sejati*". Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati di Desa Sidoasri telah sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDes, dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, melakukan musyawarah desa, serta mengeluarkan peraturan desa dimulai dari dasar hukum yang melandasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan BUMDes seperti, jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, karena manajemen pengelolaan usaha belum optimalnya, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan untuk anggota BUMDes dan masyarakat, dalam mengelola BUMDes Sumber daya manusia yang masih terbatas dan partisipasi masyarakat yang masih rendah karena masih minimnya pengetahuan mereka.²⁹
2. Mirnawati, tahun 2018 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan*

²⁹Tedi Kusuma dari Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018 yaitu "Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Sejati". (studi kasus di Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Digilib.unila.ac.id.

masyarakat”. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ekang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan sudah terlaksana dengan baik, jika dilihat dari tahap perencanaan di dalam membuat unit-unit usaha BUMDes dengan memperhatikan lingkungan sekitar sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Beberapa unit usaha BUMDes Anugrah Ekang telah memberikan peluang untuk masyarakat yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usaha mereka, membuka lapangan pekerjaan walaupun belum banyak masyarakat yang dipekerjakan. Prosedur yang ada pada setiap unit usaha BUMDes tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat. Selain itu pada tahap pengawasan yang dilakukan berpanduan pada peraturan yang telah ada dan selalu diawasi dalam bentuk administrasi maupun kegiatannya. Dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi BUMDes semua berjalan lancar.³⁰

3. Yeni Fajarwati, 2016 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan judul “*Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Badan Usaha Milik Desa di Pagedangan secara umum sudah berjalan dengan

³⁰ Mirnawati dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang 2018 “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (Studi kasus di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan). Repository.umra.ac.id. 2018

baik, di lihat dari berjalannya beberapa program utama BUMDesa, namun masih terdapat beberapa hal dan kendala yang perlu di perbaiki. *Pertama*, payung hukum tingkat daerah tentang pengelolaan BUMDesa terlambat dibuat; *Kedua*, sumber daya manusia yang ada dalam program BUMDesa ini secara kuantitas masih kurang; *Ketiga*, pengelolaan Administratif belum terkelola dengan baik hal ini di karenakah pengelola masih secara manual dan tidak rutin;. *Keempat*, kurangnya komunikasi yang di lakukan oleh para lembaga desa terutama pada anggota pelaksana BUMDesa; *Kelima*, kurangnya sosialisasi program BUMDesa baik sosialisasi pemerintah daerah ke desa-desa maupun sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat mengenai program BUMDesa; *Keenam*, belum adanya pemasukan khas desa dari BUMDesa karena program BUMDesa lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat.³¹

³¹ Yeni Fajarwati dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2016 yaitu “Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)” (studi kasus di Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Serang). Repository.fisip.untirta.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian kualitatif peneliti mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan cara berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut. Selanjutnya, dijelaskan oleh John W. Creswell pendekatan kualitatif tidak memiliki aturan, prosedur tetap, lebih terbuka dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi lapangan yang diteliti. Menurutnya, peneliti juga sebagai instrumen penelitian dalam menganalisa data harus memiliki jangka waktu yang leluasa dalam pengumpulan data.³² Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti bertujuan untuk menggali informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih dalam penelitian ini adalah gampong Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti tertarik untuk meneliti di tempat ini dengan pertimbangan bahwa gampong Alue Sungai Pinang merupakan salah satu gampong yang sudah memiliki BUMG, namun berdasarkan observasi awal peneliti menemukan adanya masalah dengan tata

³² John W. Creswell, Hamid Patilima. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfa beta. Hal: 5

kelola BUMG di gampong Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti, yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang penelitian. Hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Dimensi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Sapeu Pakat

No	Dimensi	Indikator
1	Pengelolaan	a. Memulai bisnis BUMG b. Mengelola organisasi BUMG c. Mengelola pemasaran BUMG d. Mengelola proses produksi BUMG e. Mengelola keuangan BUMG f. Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 3.2
Dimensi Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan BUMG

No	Dimensi	Indikator
1	Faktor Pendukung	Adanya dukungan dari pemerintah gampong baik materil maupun non materil
2	Faktor penghambat	a. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) b. Kurangnya pasrtisipasi masyarakat

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu narasumber yang dianggap mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti. Setelah penetapan lokasi penelitian, selanjutnya adalah memilih informan sebagai subjek penelitian. Moeleong menjelaskan bahwa penetapan informan dalam penelitian bisa menggunakan metode *purposive*, yaitu peneliti memilih informan berdasarkan bahwa informan bisa memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti.³³

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik	1 (satu) orang
2	Sekretaris gampong	1 (satu) orang
3	Pengelola BUMG	1 (satu) orang
4	Ketua Unit usaha	1 (empat) orang
5	Tuha peut	1 (satu) orang
6	Masyarakat	2 (dua) orang
	Jumlah	7 orang

Sumber: data diolah tahun 2019

E. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik jika di bandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, seperti wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan

³³ Rukin. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia. Sulawesi Selatan. Hal: 72-75

bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Sutrisno Hadi mendefinisikan bahwa, observasi sebagai suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.³⁴

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara atau interview sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara ini dilakukan pada studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Sutrisno Hadi menyatakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah : bahwa informan adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, apa yang dinyatakan oleh informan kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, dan yang terakhir adalah bahwa interpretasi oleh subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi berupa data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara peneliti atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer berupa informan, yaitu : Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua BUMG *sapeu pakat*, Sekretaris BUMG, Bendahara, *tuha peut* gampong dan Masyarakat yang terlibat serta masyarakat yang tidak terlibat dalam BUMG.

³⁴ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA. Bandung, Hal: 156

3. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial, sumber tertulis (dokumentasi) berupa data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data sekunder ataupun oleh pihak lain. Data sekunder biasanya di peroleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis seperti laporan-laporan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi surat kabar serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.³⁵

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan di interpretasikan. Untuk menganalisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara lebih terperinci.

Analisis data dapat dilakukan melalui tiga alur yakni :

- a. Reduksi data (*data reduction*), merupakan proses penyederhanaan atau pemilihan data dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika peneliti berada di lapangan. Peneliti harus melakukan pemilihan data, karena banyaknya

³⁵ Ibid Hal:42

informasi yang di peroleh peneliti di lapangan namun tidak semua tidak informasi yang di peroleh dapat mengungkap masalah penelitian.

- b. Penyajian data (*data display*), yaitu peneliti harus menyajikan data dari hasil penelitian agar memungkinkan peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara dan dapat membuat rencana selanjutnya bila data yang diperoleh peneliti belum lengkap, perlu klarifikasi atau sama sekali belum diperoleh.
- c. Verifikasi data (*conclusion drawing*), yaitu peneliti harus merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan dapat berupa simpulan sementara atau simpulan akhir (*final*).

Dari ketiga tahap analisis data di atas, ketiga analisis data dapat dilakukan secara berulang karena, dalam penelitian kualitatif proses analisis data dapat dilakukan kapan saja, artinya bahwa proses ini tidak harus dilakukan ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh proses kegiatan penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif.

³⁶ Nanang Martono. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal:11-12

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Alue Sungai Pinang terletak di pesisir Barat Daya Provinsi Aceh, diapit oleh dua pegunungan yakni bukit barisan di bagian Utara, dan pegunungan Leuser di bagian Selatan yang berhadapan langsung dengan pesawahan dan gampong Ie Khulung. Secara geografis terletak di $03^{\circ} 46'37,8''$ BT dan terletak $96^{\circ} 48'51.9$ LU. Gampong ini berada di wilayah pemukiman Kuta Jeumpa dan merupakan bagian dari 10 (sepuluh) gampong di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas wilayah ± 3460 Ha.

Menurut cerita dari para sesepuh gampong, nama desa Alue Sungai Pinang diambil dari kisah legenda Teuku Malem Diwa, karena di gampong ini tumbuh pohon pinang besar (*Areca Catechu*). Selain itu gampong Alue Sungai Pinang juga dinamai demikian dikarenakan gampong ini banyak terdapat anak sungai (*Alue*) yang airnya mengalir ke sawah-sawah penduduk, serta sebagian besar diapit oleh pohon-pohon pala. Oleh karena itu para tetua di gampong yang hidup sekitar tahun 1920 menjadikannya sebuah gampong yaitu Alue Sungai Pinang.

Pemerintahan gampong Alue Sungai Pinang sudah ada sejak zaman dahulu, dimana fungsi pemerintahan yang dijalankan sangat kental dengan budaya dan adat lokal serta mengedepankan nilai-nilai Islam. *Meunasah* merupakan simbol dan tempat mengutarakan setiap permasalahan masyarakat. Pada awal-awalnya pembentukan pemerintahan gampong secara formal, di pimpin oleh

seorang *Keuchik* serta *Tuha Peut* sebagai badan permusyawaratan gampong sudah mulai berfungsi serta penyelenggaraan pemerintahan oleh *Tuha Peut* masih sangat kental dengan adat istiadat.

Gampong Alue Sungai Pinang terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu dusun : dusun I Pasar, dusun II Alue Sanggeu, dusun III Gunoeng Teungku dan dusun IV Alue Teungku Muda. Setiap dusun di pimpin oleh seorang kepala dusun yang pilih secara musyawarah.

Tabel 4.1.

Batas wilayah Administrasi Gampong Alue Sungai Pinang

Bagian Perbatasan	Perbatasan Gampong
Sebelah Utara	Gampong Alue Seulaseh
Sebelah Timur	Desa Kuta Jeumpa
Sebelah Selatan	Desa Alue Ramboet
Sebelah Barat	Desa Cot Manee

Sumber: RPJM Gampong Alue Sungai Pinang Tahun 2015-2021

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui keempat gampong di atas menjadi batas wilayah gampong, dan keempat gampong tersebut termasuk dalam wilayah gampong Alue Sungai Pinang. Gampong Alue Sungai Pinang dilintasi jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Selatan dengan total panjang jalan provinsi yang melintas Alue Sungai Pinang ±2.280 meter.

Tabel 4.2.**Potensi Sumber Daya Alam**

Potensi Gampong	Volume
Tanah bukan sawah	2470 Ha
Tanah Gampong	8×20 meter
Tanah sawah	120,5 Ha

Sumber: RPJM Gampong Alue Sungai Pinang Tahun 2015-2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan letak dan kondisi *geografis* maka potensi pengembangan wilayah di gampong Alue Sungai Pinang lebih mengarah pada sektor pertanian dan perkebunan, hal ini ditunjukkan dengan luasnya ketersediaan lahan persawahan dan perkebunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki gampong Alue Sungai Pinang bisa dijadikan peluang kerja bagi masyarakat gampong guna meningkatkan atau membantu perekonomian masyarakat. Potensi tersebut menjadi salah satu wadah usaha yang dikelola oleh gampong Alue Sungai Pinang atau yang di sebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Jumlah penduduk gampong Alue Sungai Pinang berdasarkan *survey* yang dilakukan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 1598 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 822 orang, dan jumlah perempuan sebanyak 776 orang. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 439 KK. Kemudian pada tahun 2015 jumlah penduduk gampong Alue Sungai Pinang mengalami peningkatan, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.**Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Alue Sungai Pinang**

Tahun	penduduk		Jumlah
	Lak-laki	Perempuan	
2012	895	850	1745
2013	958	903	1861
2014	1015	967	1982
2015	1065	1031	2096

Sumber: Sekretariat Gampong Alue Sungai Pinang, 2015

Dari data pada kedua tabel diatas menunjukkan kondisi *demografis* yang diperoleh dari data gampong bahwa penduduk Alue Sungai Pinang mulai dari tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 berjumlah 2096 jiwa yang terdiri dari 1065 berjenis laki-laki, dan perempuan 1031 orang dengan jumlah kepala keluarga 568 KK.³⁷ Mata pencaharian penduduk di Gampong Alue Sungai Pinang bergerak di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

³⁷ Pofil Gampong Alue Sungai Pinang

Tabel 4.4.

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Alue Sungai Pinang

No	Jenis usaha	Jumlah penduduk	Persentase
1	Petani	160	22.30 %
2	Pedagang	35	4.65%
3	Peternak	1	0.20%
4	Pertukangan	5	0.70%
5	Sopir	10	1.40%
6	PNS	34	4.50%
7	Buruh	31	4.10%
8	TNI/POLRI	5	0.70%
9	Wiraswasta	115	15.25%
11	Pensiunan	10	1.40%
12	Ibu Rumah Tangga	348	46.20%
Jumlah		406	100 %

Sumber: RPJM Gampong Alue Sungai Pinang 2015-2021

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat gampong Alue Sungai Pinang bermata pencaharian sebagai petani, yaitu petani padi dan petani pala. Dengan jenis pekerjaan masyarakat yang beraneka ragam maka kondisi perekonomian masyarakat tentunya berbeda-beda. Gampong Alue Sungai Pinang memiliki area pertanian yang cukup luas, sehingga program pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di sektor pertanian dan di rasakan oleh para petani khususnya petani di gampong Alue Sungai Pinang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Muzahar sebagai Sekretaris gampong, beliau menyatakan bahwa :

“Dari tahun ke tahun masyarakat di gampong Alue Sungai Pinang bermata pencaharian sebagai petani, seperti petani pala dan petani padi.

Bahkan yang PNS juga bertani sebagai kerja sampingan, padi dan pala itu sudah seperti menjadi darah daging bagi masyarakat”.³⁸

Sedangkan untuk tingkat pendidikan masyarakat gampong Alue Sungai Pinang cukup bervariasi, mulai dari yang tidak menempuh pendidikan sampai menjadi lulusan perguruan tinggi namun rata-rata masyarakat menempuh pendidikan selama 16 tahun atau menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Berikut merupakan tabel rata-rata lama sekolah tahun 2012-2015 masyarakat gampong Alue Sungai Pinang.

Tabel 4.5.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2015

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
2012	19 tahun
2013	19 tahun
2014	17 tahun
2015	16 tahun

Sumber: RPJM Gampong Alue Sungai Pinang 2015-2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong Alue Sungai Pinang pada tahun 2012-2013 rata-rata lama sekolah paling lama 19 tahun, yakni menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014-2015, yaitu pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah selama 17 tahun dan pada tahun 2015 masyarakat gampong Alue Sungai Pinang rata-rata menempuh pendidikan selama 16 tahun atau sampai tingkat perguruan tinggi.

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muzahar ST selaku sekretaris gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 11:00 WIB

B. Visi dan Misi Gampong

1. Visi Gampong Alue Sungai Pinang

“Terwujudnya masyarakat Gampong Alue Sungai Pinang yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bertumpu dalam bidang pertanian dan peternakan serta keagamaan”

2. Misi Gampong Alue Sungai Pinang

Dalam meraih visi gampong Alue Sungai Pinang seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik secara *internal* maupun *eksternal*. Maka di susunlah Misi gampong Alue Sungai Pinang, yaitu :

- a. Membangun dan mendorong majunya pendidikan baik formal atau non formal yang mudah diakses, dan mudah di nikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
- b. Mengembangkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak.
- c. Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam sektor pertanian dan peternakan.
- e. Membangun sistem pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
- f. Mengembangkan potensi gampong sebagai potensi unggulan di semua bidang.

- g. Menerapkan syariat islam sesuai dengan dengan peraturan/Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya ke Gampong Alue Sungai Pinang.³⁹

C. Gambaran BUMG *Sapeu Pakat*

Pada tahun 2009 Pemerintah gampong Alue Sungai Pinang membentuk sebuah usaha yang menawarkan jasa dan barang, seperti penyewaan tanah milik gampong dengan luas 8×20, penyewaan mesin potong kayu, mesin babar rumput dan seragam maulid Nabi usaha ini bernama "*sapeu pakat*". Dana untuk usaha *sapeu pakat* bersumber dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, namun usaha tersebut tidak berjalan lama dan terbengkalai begitu saja disebabkan permasalahan internal pengurus usaha tersebut.

Setelah hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PERMENDES No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka pemerintah gampong berinisiatif untuk menggantikan usaha *sapeu pakat* dengan BUMG. Usaha *sapeu pakat* yang digantikan dengan BUMG tentunya hadir dengan konsep yang berbeda, dimana ketentuan tentang BUMG tersebut dipertegas dengan kehadiran serta bagaimana pengelolaannya melalui PERMENDES No. 4 Tahun 2015 serta Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 tentang BUMG, dan Qanun Gampong Alue Sungai Pinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMG.

Berdasarkan Qanun gampong Alue Sungai Pinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMG, tujuan pendirian BUMG yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gampong, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha

³⁹ Profil gampong Alue Sungai Pinang

ekonomi produktif untuk masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Gampong. Usaha utama BUMG Alue Sungai Pinang harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi gampong. Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMG Alue Sungai Pinang sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun adalah bidang jasa, perdagangan umum, peternakan dan bidang lain yang menguntungkan⁴⁰. Terdapat beberapa jenis unit usaha BUMG yang dikembangkan di gampong Alue Sungai Pinang, yaitu :

Tabel 4.6.
Daftar Unit usaha BUMG

No	Unit usaha	Harga sewa
1	Depot air minum	Rp.4000.000
2	Mesin molen	Rp.150.000
3	Pelaminan dan teratak	Rp.1.700.000
4	Kursus menjahit	-

1. Unit usaha Depot Air Minum

Kegiatan unit usaha Depot Air Minum untuk menunjang kegiatan unit usaha serta menunjang kebutuhan masyarakat gampong Alue Sungai Pinang. Unit usaha ini telah berdiri sejak tahun 2015, saat ini unit usaha tersebut mempekerjakan 2 (orang) sebagai pengelola unit usaha tersebut. Dalam tahun ini, berdasarkan informasi dari penyewa bahwa harga sebesar Rp.4000,000 pertahun, uang tersebut masuk ke khas BUMG sebesar Rp.3.500,000 dan sisanya menjadi milik pengurus BUMG. Usaha pengisian Air Minum isi ulang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan warga, apa lagi selama ini masyarakat harus mengisi ulang air harus ke kampung tetangga dengan biaya lebih mahal. Sekarang unit

⁴⁰ Qanun Gampong Alue Sungai Pinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMG

usaha tersebut meningkat karena pelanggan semakin meningkat, karena masyarakat di luar gampong Alue Sungai Pinang sudah ramai yang berlangganan dengan Depot Air Minum milik BUMG Alue Sungai Pinang.



Depot air minum isi ulang milik BUMG

2. Unit usaha sewamesinmolen (mesin pengaduk semen)

Molen merupakan alat atau mesin yang berfungsi untuk mengaduk semen untuk mempermudah para tukang bangunan dalam melakukan pekerjaannya. Gampong Alue Sungai Pinang penduduknya juga ada yang tukang bangunan, namun tidak memiliki mesin molen tersebut. Mesin molen ini disediakan oleh BUMG sebanyak 2 unit sejak tahun 2016. Untuk harga sewanya tergantung lama pemakaiannya, untuk masyarakat gampong Alue Sungai Pinang biasanya harga sewa sebesar Rp.150.000,00 sedangkan untuk masyarakat di luar gampong Alue Sungai Pinang dikenakan harga Rp.200.000



Mesin molen (pengaduk semen) milik BUMG

3. Unit usaha pelatihan/kursus menjahit

Unit usaha kursus menjahit menjadi salah wadah pengembangan atau pemberdayaan terhadap kaum perempuan, dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat gampong Alue Sungai Pinang dalam bidang kerajinan. BUMG mengadakan pelatihan menjahit gratis secara gratis bagi kaum perempuan yaitu para ibu-ibu dan remaja putri yang ada di gampong Alue Sungai Pinang. Dukungan terhadap kegiatan kursus menjahit difasilitasi dengan membelikan 8 unit mesin jahit, mesin bordir hingga mesin potong kain serta menyediakan satu orang tenaga pengajar atau sebagai pemandu dalam belajar menjahit. Sebelum mengikuti pelatihan peserta harus melapor ke ketua pelatihan yaitu ibu Elly Sulastrri agar diatur jadwal pelatihan, kemudian bagi penjahit pemula diwajibkan terlebih dahulu bisa menjahit sarung bantal.



Peserta kursus menjahit

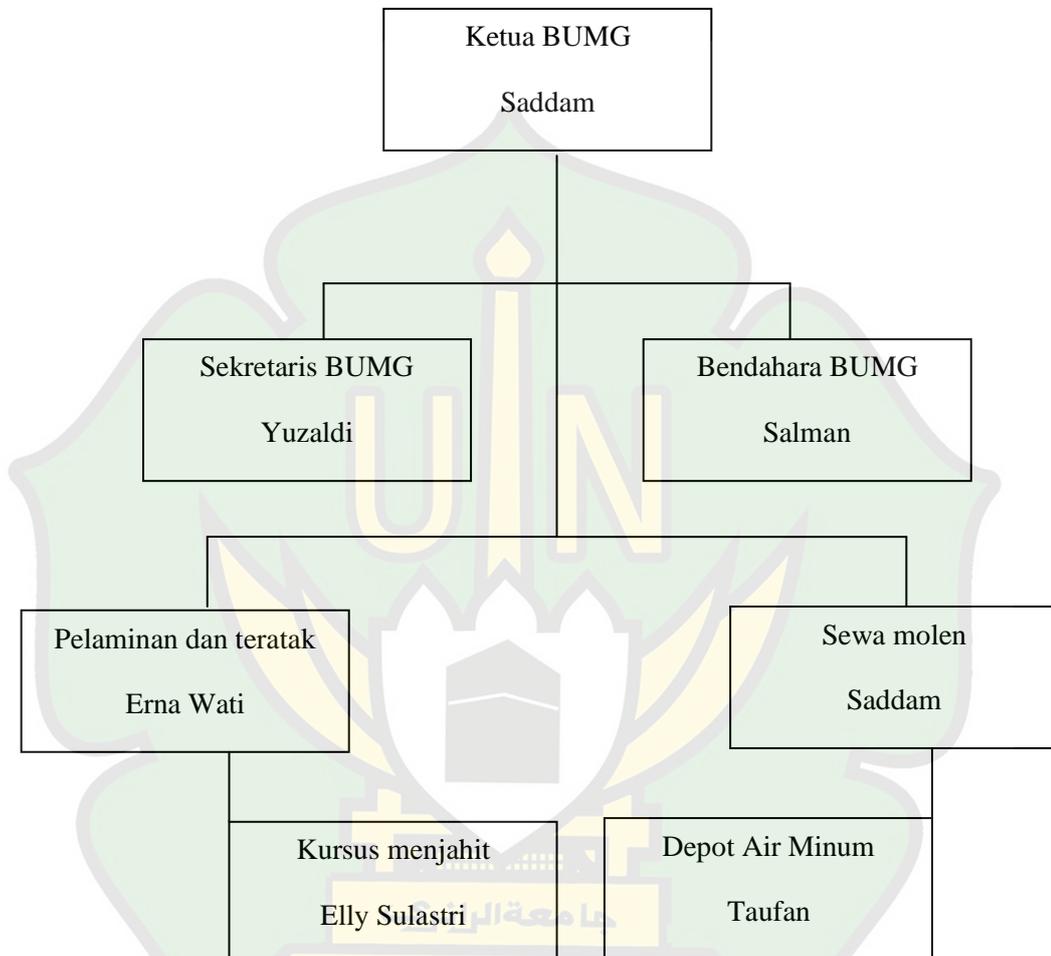
4. Unit usaha sewa pelaminan dan teratak

Unit usaha ini telah berdiri sejak tahun 2001, namun baru bergabung dalam BUMG pada tahun 2015 sejak awal berdirinya BUMG. Unit usaha ini di ketuai oleh perempuan yaitu ibu Erna Wati serta di bantu oleh 4 (empat) rekannya yang lain, yaitu 1 orang yang memasang teratak, 1 orang yang membantu memasang pelaminan, dan orang yang membawa becak untuk mengangkut barang-barang PKK tersebut. Harga sewa pelaminan dan teratak (paket lengkap) untuk masyarakat di gampong dengan harga Rp.1.700,000 untuk sekali sewa, sedangkan untuk masyarakat di luar gampong Alue Sungai Pinang seharga Rp.2.000,000. Namun, tetap diutamakan untuk masyarakat di dalam gampong.

D. Struktur Pengelola BUMGSapeu Pakat

Tabel 4.7

Pengelola/ Kepengurusan BUMG Alue Sungai Pinang



Sumber: berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BUMG Alue Sungai Pinang.

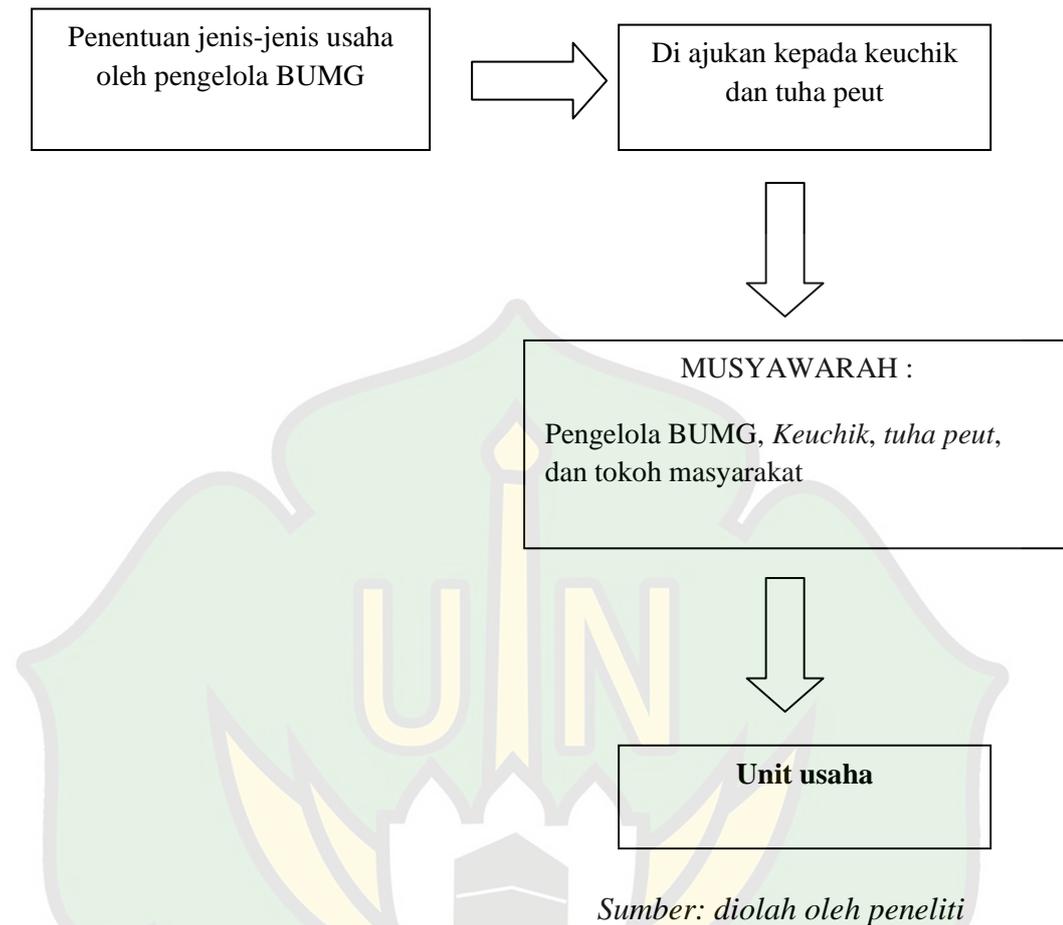
E. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang

BUMG Alue Sungai Pinang telah berdiri sejak tahun 2015. Pendirian BUMG bertujuan untuk memajukan ekonomi gampong dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada gampong. Pengelolaan BUMG menjadi hal penting untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, BUMG dapat berfungsi optimal sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMG juga dapat berfungsi sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa sebagai sumber daya lokal.⁴¹ Oleh karena itu pengelola atau pengurus BUMG harus mampu menciptakan inovasi-inovasi atau terobosan terbaru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengelola atau pengurus BUMG menggagas apa saja pilihan-pilihan jenis usaha dengan memperkirakan keuntungan serta kemanfaatan untuk masyarakat gampong, kemudian pengelola BUMG menyampaikan penentuan jenis pilihan usaha kepada *Keuchik* dan *tua peut* melalui musyawarah. Setelah penentuan pelaksanaan musyawarah, antara *keuchik* *tua peut* dan pengelola BUMG sepakat untuk memilih jenis usaha yang dianggap paling urgen dengan mengenali kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, jenis usaha yang telah dipilih dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Seperti pada tabel berikut :

⁴¹ Wayan Apsari, 2017. ejournal.undiksha.ac.id "Pengaruh efektivitas sumber daya manusia, modal kerja dan efektivitas biaya operasional terhadap sisa hasil usaha BUMG", Universitas Pendidikan Ganesha. Vol:8 No:2



Untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang dijalankan, dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) indikator Pengelolaan BUMG yang ada pada buku Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan Bum Desa.⁴² Dengan indikator tersebut, peneliti melihat bagaimana Pengelola BUMG yang memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan pembangunan ekonomi melalui BUMG, memainkan peran penting dalam pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang.

2. Memulai Bisnis BUMG

Dengan hadirnya BUMG, pemerintah gampong berharap terjadinya peningkatan kemandirian di tingkat gampong. Oleh karena itu, sejumlah regulasi pun telah disusun guna mendukung implementasi BUMG. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁴³ Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerbitkan landasan yuridis BUMG, yaitu dengan mengeluarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong. BUMG hadir di gampong Alue Sungai Pinang atas inisiatif aparatur gampong, serta didukung dengan lahirnya Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMG. Pembentukan BUMG juga merupakan kesepakatan masyarakat dengan Pemerintah gampong Alue Sungai Pinang.

BUMG yang telah berdiri berdasarkan kesepakatan dari pemerintah desa serta masyarakat, terlebih dahulu mereka telah mengidentifikasi serta memilih usaha yang layak untuk dijadikan sebagai usaha, serta telah memiliki rencana bisnis. Kemudian pengurus BUMG sudah bisa memulai usaha tersebut. Pada umumnya, BUMG memulai bisnis dengan menggunakan Kanvas Model Bisnis.⁴⁴

Bapak M.Daud Syah sebagai Keuchik gampong Alue Sungai Pinang menyebutkan :

“Sebelum berdirinya BUMG, gampong kita sudah memiliki usaha yang dikenal dengan nama usaha *sapeu pakat*, usaha ini berdiri berdasarkan inisiatif tokoh masyarakat namun karena faktor-faktor tertentu usaha ini

⁴³ Krisna Puji Rahmawati. 2019. Researchgate.net “Perencanaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat” ISSN:2598-4039 Vol: 7 No: 1

⁴⁴ Sukasmanto. Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMG. 2014. Yogyakarta

berjalan lamban dan juga tidak di landasi payung hukum. Setelah hadirnya Qanun Nomor 13 Tahun 2014 Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Badan Usaha Milik Gampong, barulah kita berinisiatif untuk mendirikan BUMG dengan cara menggantikan usaha *sapeu pakat* dengan BUMG. Namun, BUMG hadir dengan konsep yang berbeda dimana ada payung hukum yang melandasi keberadaannya serta struktur organisasinya pun cukup jelas di atur dalam Qanun”.⁴⁵

Selanjutnya, Bapak Muzahar sebagai Sekretaris Gampong menambahkan :

“Dengan hadirnya BUMG di gampong Alue Sungai Pinang selain di harapkan dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat, juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka pada saat rapat ketika pembentukan BUMG yang di hadiri oleh aparatur gampong seperti Keuchik, Sekretaris Gampong, *TuhaPeut*, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat gampong. Setelah pengurus BUMG terpilih, selanjutnya kita merencanakan program BUMG yang dapat memenuhi atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak langsung kita fokus pada keuntungannya dulu. Misalnya di gampong kita tidak memiliki galon Air minum isi ulang, kita buatkan”.⁴⁶

Dari wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pendirian BUMG belum menggunakan Kanvas Model Bisnis serta tidak mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang menjadi usaha BUMG, sebelum BUMG di bentuk. Penentuan jenis usaha di tentukan setelah BUMG berdiri dan pemilihan pengelola/pengurus BUMG. Selain itu, BUMG di gampong Alue Sungai Pinang bukan semata-mata hanya untuk meraih keuntungan, namun lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun tidak semua permasalahan dapat teratasi dengan hadirnya BUMG. Misalnya, di gampong Alue Sungai Pinang belum memiliki Depot Air minum isi ulang untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Daud Syah selaku Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muzahar selaku Sekretaris Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 11:00 WIB

masyarakat gampong. Kemudian BUMG membuat Depot Air minum isi ulang yang dikelola sebagai salah satu unit usaha yang berada dibawahnya. Pembuatan Depot Air tersebut, menjadi contoh bahwa unit usaha yang didirikan oleh BUMG berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Disisi lain BUMG masih memiliki kekurangan, contohnya dalam hal perencanaan. Dimana dalam hal tersebut BUMG dirasa masih kurang maksimal, seperti halnya pada pelatihan atau kursus menjahit yang di adakan di gampong. Dalam kegiatan tersebut terlihat adanya beberapa kekurangan berupa :: kurangnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak teratur sehingga kegiatan tersebut seperti tidak berkesinambungan dan tidak memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna Dewi yang mengikuti program kursus menjahit :

“Untuk tenaga atau pelatih dalam kursus menjahit ada 2 (dua) orang, sedangkan untuk masyarakat yang mengikutinya atau yang menjadi anggota itu lebih dari 20 orang namun tidak tetap. Kemudian kalau untuk jadwal pelatihannya tidak tetap, sering berubah dan tidak rutin. Kalau menurut jadwal, dalam seminggu pelatihan di adakan sebanyak 4 kali namun yang seringnya 2 kali dalam seminggu”.⁴⁷

Kemudian ibu Zulbaidah salah satu pembuat manisan pala menambahkan :

“Ibu- ibu pengrajin manisan pala tidak bergabung dengan BUMG, padahal kan pala mudah di peroleh di gampong kita dan juga sepertinya banyak ibu-ibu yang senang membuat kue pala tapi tidak ada usaha dari Gampong atau BUMG yang di buat untuk ibu-ibu pengrajin kue pala”.⁴⁸

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Masyarakat gampong Alue Sungai Pinang (Ibu Ratna Dewi) pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 15:00 WIB

⁴⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat gampong Alue Sungai Pinang (Ibu Zulbaidah) pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 15:00 WIB

Dari paparan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa BUMG belum memanfaatkan potensi yang ada di gampong, seperti yang dikemukakan oleh ibu Zulbaidah. Padahal jika memanfaatkan potensi gampong, BUMG bisa memanfaatkan usaha manisan pala sebagai peluang usaha karena ibu-ibu di gampong tersebut banyak yang memproduksi manisan pala dengan usaha kecil-kecilan. Hal ini menunjukkan bahwa BUMG belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ada, serta perencanaan untuk beberapa program bisa dikatakan belum maksimal.

Namun, walaupun BUMG masih memiliki kekurangan tetapi dengan adanya komitmen dari BUMG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi kekuatan penyokong untuk BUMG. Selain itu BUMG juga masih memiliki peluang untuk menambah unit usaha dengan memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki gampong Alue Sungai Pinang.

3. Mengelola Organisasi BUMG

Organisasi adalah sebuah sistem sosial sebagai tempat terjadinya interaksi antar manusia, yang mengakibatkan timbulnya kelompok non formal dalam sebuah organisasi sesuai dengan norma yang menjadi pedoman bagi setiap anggota. Organisasi merupakan bagian dari pengorganisasian atau mengelola orang adalah salah satu bagian dari kepemimpinan.⁴⁹

Keberhasilan BUMG tidak luput dari pilar penting BUMG yaitu pengelola atau pengurus BUMG yang menjadi roda sebagai penggerak atau laju BUMG.

⁴⁹Zainuddin Mustafa. 2018. Perilaku Organisasi Dalam Perspektif Manajemen Organisasi. Media Perkasa. Jakarta, Hal:27

Dengan adanya pengorganisasian dalam BUMG tujuan adalah agar terjadinya pembagian pekerjaan atau tugas-tugas dalam BUMG, sehingga tugas-tugas yang bermacam ragam tersebut dapat berkoordinasi dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengorganisasian dapat mengalokasikan atau mengerahkan sumber daya organisasi dapat mengelola usaha yang dijalankan. Desain dan struktur organisasi BUMG dibuat agar tujuan akhir dari proses pengorganisasian dapat tercapai.⁵⁰

Bapak M.Daud Syah sebagai Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang menuturkan bahwa :

“Pengelola BUMG berdasarkan AD/ART, pengelola BUMG terpisah dengan organisasi pemerintahan Gampong, dan biasanya organisasinya terdiri atas :

1. Pembina
2. Ketua Dewan Pengawas
3. Direktur BUMG
4. Manajer Keuangan dan Administrasi
5. Kepala Unit/Manajer Bidang Usaha Produksi, SPP dan Perdagangan”.⁵¹

Kemudian Bapak Muzahar sebagai Sekretaris Gampong menambahkan :

“Setelah kesepakatan ataupun musyawarah mengenai siapa saja yang akan menjadi pengurus ataupun pengelola BUMG, dan yang sangat perlu di garis bawahi adalah bahwa pengelola ataupun pengurus BUMG secara struktur organisasi terpisah dari struktur organisasi gampong. Kemudian, yang siapa saja yang mempunyai jabatan ataupun menjadi bagian dari aparatur gampong tidak bisa menjabat di BUMG karena itu menyalahi aturan. Pengorganisasian BUMG ini tentunya untuk memajukan BUMG itu sendiri dengan cara mereka saling berbagi tugas dan tanggung jawab. Jadi, untuk mempermudah satu sama lain”.⁵²

⁵⁰Dodi Faedlulloh. 2018. Jurnal.untirta.ac.id “BUMDes dan Kepemilikan Warga:Membangun Skema Organisasi Partisipatoris” Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta E-ISSN: 2598-6465 Di akses pada tanggal 20 Agustus 2019 Pukul 19:00 WIB

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Daud Syah selaku Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Muzahar selaku Sekretaris Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 15 Agustus 2019

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa, bahwa struktur organisasi BUMG terpisah dari desain struktur organisasi gampong, namun demikian gampong ataupun aparatur gampong tetap menjadi bagian dari BUMG yaitu sebagai pihak yang ikut mengawasi BUMG bersama masyarakat. Selain itu pengelola atau pengurus BUMG yang dipilih melalui musyawarah, adalah agar dapat mencapai tujuan BUMG. Dengan adanya pengorganisasian BUMG maka setiap orang yang terlibat di dalamnya akan mendapat pembagian kerja sesuai dengan posisi jabatan yang dimiliki, agar dapat terjamin setiap tugas mereka dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengorganisasian BUMG dapat diketahui dengan jelas struktur formal pekerjaan dalam pengelolaan BUMG.

Dalam pengelolaan struktur organisasi BUMG Alue Sungai Pinang, perempuan juga ikut mengambil peran penting dalam pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang. Partisipasi perempuan juga menentukan keberhasilan BUMG, karena partisipasi kaum perempuan adalah salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk berpartisipasi terhadap pembangunan, salah satu contohnya adalah berpartisipasi dalam BUMG. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M.Daud Syah selaku *Keuchik* gampong Alue Sungai Pinang :

“Untuk 2 (dua) unit usaha BUMG yang ditangani oleh kaum perempuan, dan satu usaha tersebut di peruntukkan khusus untuk kaum perempuan”.⁵³

⁵³hasil wawancara dengan Bapak M.Daud Syah selaku *Keuchik* Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 20:00 WIB

Dari beberapa unit usaha yang dikembangkan oleh BUMG Alue Sungai Pinang terdapat 2 (dua) perempuan yang menduduki jabatan sebagai ketua unit usaha BUMG, yaitu ketua unit usaha kursus menjahit di ketuai oleh ibu Elly Sulastri dan ketua unit usaha pelaminan dan teratak oleh ibu Erna Wati.

Namun, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan organisasi BUMG, seperti optimalisasi pengurus BUMG hal ini disebabkan pemahaman pengurus/pengelola mengenai BUMG masih kurang. Selanjutnya, salah satu pengelola BUMG yang menjabat sebagai Sekretaris BUMG tidak berdomisili lagi di gampong Alue Sungai Pinang, namun beliau tetap masih membantu kegiatan BUMG. Hal ini memungkinkan BUMG untuk merekrut sekretaris yang baru, karena salah satu syarat untuk menjadi pengelola/pengurus harus masyarakat yang berdomisili di gampong tersebut.

4. Mengelola Pemasaran BUMG

Keberhasilan suatu usaha dan bisnis sangat di tentukan oleh bagaimana pengelolaan pemasarannya, begitu juga halnya dengan BUMG meski pun BUMG adalah bisnis dengan berwatak sosial atau biasa di sebut *sosial entrepreneurship* tetapi pada dasarnya tetap membutuhkan pendapat sebagai bukti bahwa tujuannya tercapai. Kegiatan pemasaran merupakan faktor penentu terhadap keberlangsungan BUMG. Kegiatan pemasaran bisa di mulai dari mengetahui apa saja yang di jual atau di tawarkan dari pihak BUMG baik itu berupa barang maupun jasa, kemudian apakah yang di tawarkan oleh BUMG menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan apakah hal tersebut menjadi solusi untuk problem masyarakat. Jadi, pemasaran merupakan salah satu fungsi dari sebuah organisasi, dan seperangkat alat sebagai proses menciptakan pola komunikasi serta pelanggan

diberikan hak untuk menilai terkait barang atau jasa yang telah di tawarkan oleh individu, kelompok maupun perusahaan.⁵⁴

Strategi pemasaran dalam BUMG merupakan bagian dari perencanaan pemasaran, strategi pemasaran adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan BUMG yang dilakukan secara berkesinambungan melalui program pemasaran bertujuan untuk melayani pasar atau masyarakat. Pemasaran merupakan kegiatan dengan menggabungkan variabel-variabel pemasaran yang bisa dikendalikan. Kegiatan pemasaran terdiri atas : barang atau jasa (*Product*), harga (*Price*), distribusi (*place*) dan promosi (*promotion*).

Pertama,Barang dan jasaapa saja yang telah di sediakan atau di sediakan oleh BUMG Alue Sungai Pinang untuk masyarakat sebagai pelanggan. Pada hakikatnya barang dan jasa merupakan apa saja yang di dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen atau pelanggan. Produk juga merupakan elemen paling penting dari kegiatan pemasaran. Ketua BUMG Alue Sungai Pinang Bapak Saddam menyatakan bahwa :

“BUMG Alue Sungai Pinang kalau dalam jenis barang kita punya unit usaha sewa sawah, sewa moler (mesin pengaduk semen), Depot Air Minum Isi Ulang, sewa Pelaminan dan teratak, sedangkan untuk dalam bentuk jasa kita punya pelatihan atau kursus menjahit untuk kaum perempuan dan ibu-ibu”.⁵⁵

Kedua, penetapan harga jual atau sewa yang ditetapkan oleh BUMG merupakan salah satu kegiatan dalam pemasaran BUMG, dengan adanya ketetapan harga akan berdampak secara langsung bagaimana keberhasilan usaha BUMG. Besar atau kecil keuntungan yang di peroleh dan berapa lama waktu yang

⁵⁴ Sukasmanto. Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMG. 2014. Yogyakarta

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saddam sebagai Ketua BUMG Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

di butuhkan oleh BUMG untuk balik modal, akan dipengaruhi oleh penentuan harga jual ke masyarakat. Ketua BUMG Alue Sungai Pinang Bapak Saddam mengemukakan bahwa :

“Terkait harga kita tidak memasang harga yang tinggi, dan tentunya harga produk atau jasa yang ditawarkan oleh BUMG tentunya berbeda-beda. Artinya, harga barang atau jasa BUMG akan berbeda harganya untuk pelanggan yang masyarakat gampong dengan masyarakat yang bukan penduduk gampong. Seperti, harga sewa pelaminan jika untuk masyarakat gampong harganya Rp.500,000 sedangkan untuk yang bukan masyarakat gampong Alue Sungai harga sewanya adalah Rp. 700,000. Begitu juga dengan penawaran barang yang lain,kita akan memasang harga yang berbeda-beda tergantung konsumen dan barangnya”.⁵⁶

Ketiga, saluran distribusimerupakan kegiatan yang digunakan perusahaan atau pun badan usaha untuk menyampaikan agar produknya sampai kepada konsumen atau pelanggan tepat pada waktu yang diinginkan atau diperlukan. Biaya yang dikucurkan oleh BUMG tergantung pada saluran distribusi yang pilih oleh BUMG. Biasanya BUMG memilih saluran distribusi langsung, artinya pada distribusi ini barang atau jasa langsung sampai ke tangan masyarakat tanpa melalui agen dan perantara.

Keempat, salah satu bagian dari kegiatan pemasaran yaitu promosi, promosi merupakan pola komunikasi yang berisi ajakan, membujuk, serta meyakinkan konsumen atau pelanggan yang mengarah pada tingkat pemasaran. Promosi dapat dilakukan melalui periklanan, personal *selling*, promosi penjualan, serta kegiatan hubungan masyarakat. Aktivitas promosi harus direncanakan secara matang agar dapat memberi dampak atau efek yang maksimal terhadap

⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saddam sebagai Ketua BUMG Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

peningkatan penjualan bagi BUMG. Adapun tujuan dilakukan kegiatan promosi adalah untuk menyampaikan informasi terhadap konsumen terkait produk yang telah di sediakan oleh BUMG, serta memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait produk BUMG. Bapak yuzaldi selaku Sekretaris BUMG menyatakan :

“Jika terkait promosi tentang barang atau jasa yang di tawarkan BUMG kita tidak membuat spanduk atau sejenis iklan baliho seperti itu ya, mungkin promosi kita lebih kepada dari mulut ke mulut ya. Misalnya, seperti tukang bangunan nanti memberitahu kepada si A atau si B kalau membutuhkan molen atau mesin pengaduk semen bisa sewa milik BUMG punya gampong kita”.⁵⁷

Dalam pengelolaan pemasaran BUMG di gampong Alue Sungai Pinang belum memanfaatkan belum menggunakan media sosial untuk pemasaran produk BUMG, selain itu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat menyebabkan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui terkait program atau jasa yang ditawarkan BUMG. Dengan adanya kegiatan pemasaran dalam BUMG, maka dapat meningkatkan kesuksesan BUMG melalui penjualan barang atau jasa yang di sediakan oleh BUMG Alue Sungai Pinang.

⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuzaldi sebagai Sekretaris BUMG Alue Sungai Pinang pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 17:00 WIB

5. Mengelola proses produksi BUMG

Manajemen produksi BUMG adalah kegiatan pengelola BUMG yang berkaitan dengan pembuatan produk atau jasa. Dengan kata lain, merupakan kegiatan yang menghasilkan nilai tambah (manfaat) atau bisa memberikan manfaat yang baru. Input di kategorikan atas 2 macam yaitu, faktor-faktor produksi yang terdiri atas 4 M [*man* (manusia), *money* (uang), *material* (bahan baku) dan *method* (mesin, peralatan, teknologi)]. Pengelolaan dapat dikelola melalui faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, peralatan dan bahan baku. Dengan adanya fungsi pengelolaan produksi oleh pengelola BUMG secara efektif dan efisien maka akan menghasilkan produk BUMG yang berkualitas.⁵⁸

Untuk perawatan setiap barang milik BUMG di kelola oleh ketua unit usaha, Untuk Depot Air Minum Isi Ulang di butuh perawatan mesinnya, untuk sewa sawah untuk menyalurkan air ke sawah yang berasal dari irigasi itu menjadi pekerjaan bagi penyewa sawah begitu juga untuk membajak tanah, sementara untuk bahan Perkakas pesta misalnya ada Perkakas pesta yang rusak seperti pelaminan, atau piring dan gelas pecah maka penyewa wajib menggantikannya dengan barang yang sama. Sedangkan untuk molen (mesin pengaduk semen) bagi para penyewa sebelum mengembalikan molen wajib membersihkan mesinnya sampai bersih setelah pemakaiannya agar mesin tersebut tidak berkarat, sementara untuk pengisian oli mesin di ganti secara rutin setiap sebulan sekali oleh ketua unit usaha.

⁵⁸Sukasmanto. Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMDes. 2014. Yogyakarta

Untuk kursus menjahit penyediaan mesin jahit dan mesin bordir di peroleh dari BUMG, kemudian untuk penyediaan perlengkapan lainnya seperti gunting, jarum, alat ukur dan lain-lain menjadi kewajiban ketua unit usaha dalam pengelolaannya. Sementara untuk lokasi kursus menjahit masih di kantor Desa, hal ini tentu sedikit mengganggu kegiatan di kantor desa. Adanya kemauan anggota untuk tetap mengikuti kursus menjahit walaupun di kantor keuchik serta jadwal yang tidak menentu, ini menjadi kekuatan tersendiri bagi BUMG

6. Mengelola Keuangan BUMG

Laporan keuangan adalah salah satu komponen utama guna meningkatkan akuntabilitas. Informasi akuntansi berupa laporan keuangan adalah sebagai tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas. Pengelolaan sumber daya ekonomi suatu entitas di pertanggung jawabkan melalui bentuk laporan keuangan.⁵⁹

Kemampuan manajemen keuangan BUMG akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan BUMG. Laporan keuangan dalam pengelolaan BUMG wajib di susun berdasarkan kaidah dan standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi merupakan seni dalam melakukan pencatatan, pengelompokan, serta laporan transaksi keuangan.⁶⁰

Secara konseptual BUMG juga perlu menyusun laporan keuangan guna dapat menyajikan informasi tentang bagaimana posisi keuangan, realisasi anggaran, arus khas serta kinerja keuangan suatu entitas laporan keuangan

⁵⁹Dina Irawati. 2018. Jurnal.unej.ac.id “Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa” Universitas Islam Balitar ISBN: 978-602-5617-01-0 Di akses pada tanggal 20 Agustus 2019 Puku 19:00 WIB

⁶⁰Sukasmanto. Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMG. 2014. Yogyakarta

yang bermanfaat untuk para pengguna. BUMG membuat laporan keuangan setiap satu tahun sekali, yang di laporkan kepada *Pak Keuchik* dan *Tuha Peut*.

Untuk pembagian hasil usaha BUMG Alue Sungai Pinang ditetapkan berdasarkan ketentuan yaitu : penambahan modal BUMG, bagi hasil usaha kepada pemilik modal, tunjangan bagi pengurus dan karyawan dan Dana/bantuan sosial.

Bapak Muhammad Daud Syah selaku Keuchik Gampong menuturkan bahwa :

“Jika di tanya mengenai apakah BUMG Alue Sungai Pinang sudah transparansi terkait laporan keuangan BUMG, begini ya nak dulu kita mengalokasikan Dana Gampong untuk BUMG itu dalam bentuk barang yang di minta BUMG itu apa dan apa yang menjadi kebutuhan BUMG, kita menyediakannya dalam bentuk pengadaan barang. Namun, hampir 2 tahun kita hanya mentransfer langsung ke rekening pribadi miliknya BUMG dan bukan lagi dalam bentuk pengadaan barang, uang yang sudah di transfer terserah mau di pergunakan untuk keperluan BUMG. Namun, ketika dana untuk BUMG langsung kita kucurkan dalam bentuk uang bukan lagi dalam bentuk pengadaan barang seharusnya mereka membuat laporan keuangan harus secara rinci dan di sertai dengan bon misalnya, berapa uang untuk pembelian barang A berapa untuk pembelian barang B itu harus manufakturnya. Tetapi, mereka hanya menyerahkan laporan yang manual seperti, dan secara administrasi itu kan tidak sah”⁶¹

Lebih lanjut Bapak Muzahar selaku Sekretaris Gampong menambahkan :

“Pihak BUMG menyampaikan laporan keuangan selama setahun sekali, namun laporan keuangan tersebut tidak bisa kita bukukan karena secara administrasi tidak sah. Di karena mereka membuat laporan tentang rincian pengeluaran keuangan tidak di sertai manufaktur dan mereka juga belum membukukan sesuai dengan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Daud Syah selaku Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

kaidah akuntansi, ini merupakan hal wajar karena mereka belum memiliki kemampuan tersebut”.⁶²

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terkait pelaporan keuangan BUMG Alue Sungai Pinang belum cukup transparan dalam pelaporan keuangan, seperti pembukuan laporan keuangan BUMG masih menggunakan sistem manual dan bisa menimbulkan peluang korupsi. Memungkinkan terjadinya manipulasi keuangan atau ada peluang penyelewengan dana BUMG. Selanjutnya laporan keuangan sering tidak tepat waktu. Ini menjadi gambaran bahwa seberapa informasi yang terdapat pada laporan keuangan BUMG Alue Sungai Pinang belum mencerminkan suatu kondisi atau keadaan BUMG tersebut. Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMG sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat agar diketahui dengan jelas bagaimana kondisi keuangan BUMG.

Transparansi di bidang manajemen berarti adanya sifat keterbukaan dalam pengelolaan sebuah kegiatan. Pengelolaan keuangan dengan transparan tentunya bisa membuat masyarakat dan pemerintah gampong bisa mengetahui kemana dan untuk apa saja dana BUMG digunakan, dan berapa dana yang di kucurkan untuk setiap unit usaha apakah sama atau tidak. Selain itu, dengan adanya sistem transparansi pelaporan keuangan BUMG juga merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak pengelola BUMG baik kepada masyarakat maupun kepada aparat gampong.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Muzahar selaku Sekretaris Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 14:00 WIB

Tabel 4.8

Laporan Keuangan BUMG Sapeu Pakat Tahun 2017

Tanggal	Keterangan	Pendapatan	Pengeluaran
20/10/2017	Saldo awal	Rp.850.000	
	Beli pulsa listrik		Rp.52.000
	Sewa molen	Rp.150.000	
4/12/2017	Sewa teratak 3 rumah	Rp.920.000	
	Perbaikan mesin mix		Rp.80.000
	Beli tutup sound		Rp.50.000
	Sewa teratak	Rp.1.200.000	
	Cuci teratak		Rp.200.000
	Perbaikan sound		Rp.100.000
	Sewa teratak dan mix	Rp.500.000	
	Beli stabilizier sound		Rp.2.800.000
	Tunjangan pengurus		Rp.2.055.000
	Jumlah	Rp.3.620.000	Rp.5.337.000

Tabel 4.9

Laporan Keuangan BUMG Sapeu Pakat Tahun 2018

Tanggal	Keterangan	Pendapatan	Pengeluaran
12/2/2018	Kenduri rumah Hery	Rp.1.400.000	
	Biaya pemasangan		Rp.700.000
	Kenduri rumah Fajri	Rp.700.000	
	Biaya pemasangan		Rp.350.000
	Kenduri rumah nek Man	Rp.800.000	
	Biaya pemasangan		Rp.400.000
4/3/2018	Kenduri rumah Salaman	Rp. 600.000	
	Biaya pemasangan		Rp.300.000
	Kenduri rumah Rusliadi	Rp.800.000	
	Biaya pemasangan		Rp.400.000
	Kenduri rumah Giding	Rp.200.000	
	Biaya pemasangan		Rp.100.000
	Kenduri rumah Bang Tar	Rp.600.000	
	Biaya pemasangan		Rp.300.000

24/4/2018	Kenduri rumah Malika	Rp.50.000	
	Acara di SMA N.1 Jeumpa	Rp.1.000.000	
	Biaya pemasangan		Rp.500.000
	Kenduri rumah Baiti	Rp.1.000.000	
	Biaya pemasangan		Rp.500.000
1/7/2018	Beli bahan ATK catatan ADM BUMG		Rp.50.000
	Sound rumah Alfi	Rp.200.000	
	Kenduri rumah Makjah	Rp.600.000	
	Biaya pemasangan		Rp.300.000
	Beli kabel stik		Rp.37.000
	Beli vitting gantung		Rp.8.000
	Beli vitting lampu		Rp.20.000
	Beli perlengkapan listrik		Rp.60.000
	Sound Cot Mane	Rp.350.000	
	Biaya pemasangan		Rp.150.000
	4/8/2018	Kenduri rumah Caren	Rp.550.000
Biaya pemasangan			Rp.250.000
Beli bola lampu			Rp.50.000
Kenduri rumah Itar		Rp.1.000.000	
Biaya pemasangan			Rp.500.000
Kenduri rumah Sapii		Rp.1.200.000	
Biaya pemasangan			Rp.600.000
Perbaiki sound			Rp.100.000
7/9/2018	Kenduri rumah Misbah	Rp.600.000	
	Biaya pemasangan		Rp.300.000
	Kenduri rumah Misdar	Rp.700.000	
	Biaya pemasangan		Rp.350.000
	Beli wayer		Rp. 159.000
	Kenduri rumah Ma'in	Rp.300.000	
	Biaya pemasangan		Rp.150.000
	Kenduri rumah Derih	Rp.600.000	
	Biaya pemasangan		Rp.300.000
	Kenduri rumah Adi Pop	Rp. 1.700.000	
	Biaya pemasangan		Rp.675.000
	Beli cok listrik		Rp.30.000
	Cuci teratak		Rp.50.000
	Biaya jaga sound		Rp.150.000

29/9/2018	Bayar sewa gudang		Rp.1.000.000
16/10/2018	Kenduri rumah Cek Adib	Rp. 245.000	
	Biaya pemasangan		Rp. 125.000
	Kenduri rumah Cek Usuf	Rp.500.000	
	Biaya pemasangan		Rp.250.000
	Kenduri rumah Makcik	Rp.300.000	
	Biaya pemasangan		Rp.150.000
	Kenduri rumah Cek Dun	Rp.1.450.000	
	Biaya pemasangan		Rp.700.000
3/11/2018	Kenduri rumah Syakban	Rp.1.450.000	
	Biaya pemasangan		Rp.700.000
	Kenduri rumah Marijun	Rp.600.000	
	Biaya pemasangan		Rp.300.000
	Buat becak		Rp.100.000
	Sewa molen	Rp.1.000.000	
17/12/2018	Sewa Teratak G.Cut	Rp.600.000	
	Biaya pemasangan		Rp.300.000
	Beli peralatan sound		
	Beli mic		Rp.425.000
	Beli lampu disko		Rp.60.000
	32 kabel		Rp.240.000
	Perbaiki sound		Rp.150.000
	Perbaiki stabilizier		Rp.20.000
	Beli obeng dll		Rp.22.000
	Sewa sound C.Manee	Rp.350.000	
	Biaya pemasangan		Rp.150.000
	Jumlah	Rp.17.449.000	Rp. 12.481.000

Tabel 4.10

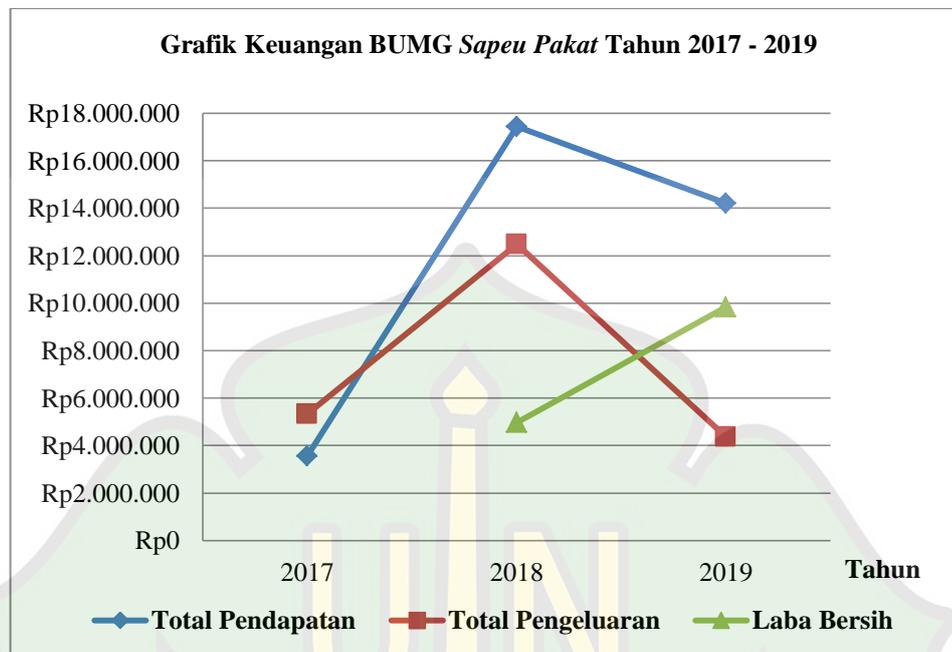
Laporan Keuangan BUMG Sapeu Pakat Tahun 2019

Tanggal	Keterangan	Pendapatan	Pengeluaran
26/1/2019	Kenduri rumah Faridah	Rp.1.100.000	
5/2/2019	Biaya pemasangan		Rp.550.000
	Kenduri rumah Petok	Rp.500.000	
	Ongkos pemasangan		Rp. 250.000
	Kenduri rumah Muklis	Rp.800.000	
	Ongkos pemasangan		Rp.400.000
	Bayar listrik+batre mikrofon		Rp.72.000
	Cetak bon faktur		Rp.150.000
25/6/2019	Kenduri rumah Baiti	Rp. 500.000	
	Ongkos pemasangan		Rp.250.000
	Kenduri rumah Alm. Daron	Rp.300.000	
	Ongkos pemasangan		Rp.150.000
	Tunjangan pengurus		Rp.550.000
	Potong pinjaman		
	Total khas simpanan pada Bendahara tahun 2018 s/d 2019		
	Tambah sewa mesin RO	Rp.11.0000.000	
	Tunjangan pengurus 40%		
	Sewa gudang		Rp.2.000.000
	Sisa khas BUMG		
	Jumlah	Rp.14.200.000	Rp.4.372.000

Tabel 4.11

Laba Bersih Pendapatan BUMG 2017-2019

Tahun	Total Pendapatan	Total pengeluaran	Laba bersih
2017	Rp.3.570.000	Rp.5.337.000	-
2018	Rp17.449.000	Rp. 12.481.000	Rp.4.968.000
2019	Rp. 14.200.000	Rp.4.372.000	Rp.9.828.000



Berdasarkan laporan keuangan BUMG *sapeu pakat* pada grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019, keuangan BUMG mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 Rp.3.570.000 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu Rp17.449.000 dengan laba bersih senilai Rp.4.968.000 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 Rp.14.200.000 dengan laba bersih Rp.9.828.000. keuangan BUMG mengalami kenaikan dan penurunan, namun laba bersih yang diperoleh cukup tinggi yakni pada tahun 2019.

7. Mengelola Manajemen Sumber Daya Manusia BUMG

Sumber daya manusia menjadi aspek terpenting untuk dikelola dengan baik, manusia sebagai pengelola, manajemen serta karyawan. Dalam BUMG pengelolaan sumber daya manusia adalah sebagai roda pemutar kegiatan BUMG yang wajib dikelola dengan profesional. Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa juga menjadi penentu terhadap pengembangan BUMG, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. SDM menjadi penting untuk di kelola dikarenakan SDM lah yang menentukan keberhasilan BUMG. Manajemen SDM terdiri dari perencanaan SDM, Analisis Pekerjaan, Rekrutmen (pemilihan karyawan), seleksi, orientasi hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK.⁶³

Bapak M. Daud Syah selaku keuchik Gampong Alue Sungai Pinang menuturkan :

“Para pengurus atau pengelola BUMG ini dulu kita pilih bersama dalam rapat Gampong di Mesjid, yang ikut dalam pemilihan pengurus BUMG saat itu ada tuha peut, aparatur Gampong dan pemuda. Yang kita pilih tentunya yang usia masih muda dan masih bisa mengasah pikiran mereka untuk membuat inovasi-inovasi terhadap BUMG kita, dan yang paling wajib mereka berdomisili di gampong Alue Sungai Pinang. Jika tidak berdomisili di gampong kita takutnya nanti jika masyarakat membutuhkan dia tidak ada di tempat, jadi untuk menjaga jarak dan waktunya itu. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi pengelola BUMG, yang penting dia berdomisili tetap di gampong Alue Sungai Pinang dan mempunyai kemauan. Untuk tingkat pendidikan rata-rata pengurus BUMG merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA)”⁶⁴

⁶³ Sukasmanto. Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMDes. 2014. Yogyakarta

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Daud Syah selaku Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

Tabel 4.12**Tingkat Pendidikan Pengelola BUMG**

Pengelola BUMG	Tingkat Pendidikan
Elly Sulastri	Sarjana/Strata Satu (S1)
Saddam	Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA)
Yuzaldi	Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA)
Salaman	Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA)
Taufan	Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA)
Erna Wati	Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Selanjutnya bapak Salaman sebagai bendahara BUMG menambahkan :

“Kami ini pengelola BUMG di pilih melalui musyawarah gampong yang dilaksanakan oleh aparaturnya Gampong bersama masyarakat, dan juga merupakan atas kerelaan sendiri. Namun, di samping menjadi pengelola BUMG kami juga mempunyai pekerjaan lain artinya ini menjadi kerja sampingan. Namun demikian, meskipun ini kerja sampingan bukan berarti kami menganggapnya pekerjaan yang mudah karena ini juga bentuk amanat dari masyarakat. Tidak ada kompensasi dalam mengurus BUMG, paling kalau misalnya untuk harga sewa seperti barang atau jasa yang di tawarkan BUMG paling harga sewanya lebih murah kalau untuk pengurus BUMG. Sedangkan, untuk sistem penggajian kita tidak di gaji dari Dana Gampong, gaji kita itu ya berasal dari laba bersih yang diperoleh BUMG”.⁶⁵

Dari pemaparan yang di sampaikan oleh Bapak Salaman sebagai bendahara BUMG, dapat diketahui bahwa pelatihan guna penguatan pengelola atau sumber daya manusia yang ada pada BUMG masih kurang. Padahal seperti diketahui pelatihan cukup penting sebagai pengetahuan dan peningkatan keterampilan bagi pengelola BUMG, dan sebagai bentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, para pengurus BUMG juga tidak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Salaman sebagai Bendahara BUMG Alue Sungai Pinang pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 16:00 WIB

memiliki latar belakang pendidikan bisnis ataupun wirausaha, sehingga pelatihan di rasa perlu untuk penguatan organisasi BUMG. Kemudian, untuk sistem penggajian bagi pengelola BUMG di peroleh dari laba bersih, setelah pembagian 60% untuk gampong dan 40% untuk BUMG. Penentuan bagi hasil tersebut berdasarkan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di sah oleh *Keuchik* serta *Tuha Peut* yang telah di sampaikan ke Bupati melalui camat.

Dalam pelaksanaannya BUMG di gampong Alue Sungai Pinang masih kekurangan SDM yang berkualitas, sepertinya kurang memiliki kemampuan manajerial kewirausahaan dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pengelolaan BUMG berjalan kurang optimal. Namun demikian, hal tersebut dijadikan sebagai motivasi bagi pengelola/pengurus BUMG untuk terus berbenah diri terhadap kemajuan BUMG.

8. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang

Dalam pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang, optimalisasi peran BUMG tentunya banyak faktor pendukung maupun faktor penghambat, ini tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam setiap kegiatan. BUMG Alue Sungai Pinang tidak menyangkal adanya hal tersebut, terlebih lagi BUMG Alue Sungai Pinang bukanlah BUMG dengan karir yang mantap, BUMG Alue Sungai Pinang merupakan usaha yang baru seumur jagung dan masih baru merintis usahanya.

a. Faktor Pendukung

Kehadiran BUMG Alue Sungai Pinang lahir karena adanya inisiatif dari pemerintah gampong dan masyarakat. Dalam keberadaan BUMG di gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa tentu tidak terlepas dari faktor pendukung yang akan menyokong atau memperkuat keberadaannya sebagai sebuah lembaga usaha. Adapun faktor pendukung terhadap keberadaan BUMG di gampong Alue Sungai yaitu berupa adanya dukungandari Pemerintah Gampong

Kehadiran serta pelaksanaan BUMG di gampong Alue Sungai Pinang , pastinya dukungan dari pemerintah gampong menjadi pilar penting dalam pelaksanaannya karena BUMG tidak akan mungkin berjalan tanpa dukungan pemerintah gampong. Dukungan dari pemerintah gampong yang di maksud adalah seperti komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui hadirnya BUMG dan Dana gampong yang di kucurkan khusus untuk BUMG. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak M.Daud Syah selaku Keuchik gampong Alue Sungai pinang :

“Saya sebagai pemimpin di gampong ini dan tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung kalau di gampong kita ada BUMG, banyak manfaat nya terutama untuk masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh Pengelola atau pengurus BUMG jika itu penting dan bermanfaat untuk khalayak, ya silahkan. Misalnya dulu, kita hanya menyalurkan barang untuk BUMG bukan dalam bentuk dana, namun setelah musyawarah dengan pengelola BUMG akhirnya kita hanya mentransferkan uang ke rekening BUMG dan kita tidak menyalurkan dalam bentuk pengadaan barang lagi”.⁶⁶

⁶⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Daud Syah selaku Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung terhadap pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang, juga di temukan beberapa faktor penghambat berdasarkan hasil penelitian pada pengelolaan BUMG Alue Sungai Pinang antara lain yaitu :

1) Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat tentunya akan menjadi faktor pendukung dalam membangun BUMG, ini menjadi Pekerja rumah atau PR bagi pemerintah gampong bagaimana cara agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah gampong atau pengelola/pengurus BUMG kepada masyarakat tentang BUMG, yang diharapkan dapat menambahkan edukasi kepada masyarakat Alue Sungai Pinang dan kemudian dapat mempengaruhi pola pikir mereka terhadap BUMG. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saddam selaku ketua BUMG :

“Rendahnya partisipasi atau kemauan masyarakat kita untuk menjadi bagian dari BUMG disebabkan oleh pola pikir mereka yang menganggap bahwa BUMG itu hanya milik aparatur gampong dan orang terdekat aparatur Gampong saja, maka dari itu saya rasa perlu sering-sering dilakukan sosialisasi untuk menambah edukasi bagi mereka dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya mereka. Dan selama BUMG ada sepertinya sosialisasi secara langsung hanya baru sekali dilakukan, dan itupun awal-awal BUMG berdiri. Dan di spanduk Kantor Keuchik kita ada juga dituliskan terkait alokasi Dana untuk BUMG dan saya rasa itu juga bentuk sosialisasi”⁶⁷.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saddam selaku Ketua BUMG Alue Sungai Pinang pada tanggal 14 Agustus 2019

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat :

“Bagaimana mau ikut serta dengan BUMG kita apa-apa aja tentang BUMG tidak tahu, kalau sudah dengar BUMG yang kami ingat Cuma PKK karena sering sewa juga kan. Cuma kalau untuk usaha-usaha yang lain saya tidak tahu. Terakhir saya tahu BUMG ada adakan pelatihan menjahit ya, tapi saya tau nya setelah program itu selesai”.⁶⁸

Kemudian ibu Qismaini juga menambahkan :

“Kalau BUMG saya tahu, tapi kalau manfaat yang benar-benar terasa bagi saya itu cuma program PKK dengan Depot Air Minum karena setiap masyarakat merasakan manfaatnya. Cuma kalau untuk sewa sawah itu agak susah dapatnya, karena yang saya perhatikan yang sewa sawah itu hanya orang terdekat dengan pemerintah Gampong saja dan penyewanya Cuma orang-orang itu saja”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kurang karena memang masyarakat itu tidak tahu-menahu tentang BUMG, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah Gampong maupun dari pengurus BUMG itu sendiri dan tidak semua masyarakat mengetahui atau paham tentang keberadaan BUMG di Gampong Alue Sungai Pinang. Karena kurangnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat belum antusias dalam pelaksanaan kegiatan BUMG, bahkan tidak sedikit masyarakat yang belum tahu tentang keberadaan BUMG.

2) Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor penghambat yang kedua adalah ditinjau dari aspek penguatan sumber daya dan penguatan organisasi, pada intinya sama yaitu terletak pada pengelola atau pengurus BUMG Alue Sungai Pinang. Faktor penghambat dalam

⁶⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Alue Sungai Pinang (ibu Salawati) pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 16:00 WIB

⁶⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Alue Sungai Pinang (Ibu Qismaini) pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 14:00 WIB

penguatan sumber daya manusia adalah kurangnya pelatihan yang di dapat oleh pengelola atau pengurus BUMG, seperti pelatihan manajemen, pelatihan wirausaha. Pelatihan BUMG cukup penting di dapatkan, karena mengingat pengelola BUMG yang notabenenya adalah sebagai pilar utama dalam menjalankan roda BUMG. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Muzahar selaku Sekretaris Gampong Alue Sungai Pinang :

“Salah satu faktor penghambat dalam berjalannya BUMG kita adalah dimana para pengelola BUMG kita tidak mendapat pelatihan, pelatihan pernah dilakukan namun hanya satu kali selama BUMG kita berdiri. Kalau Cuma sekali ya bisa dikatakan pelatihan itu sama saja dengan tidak ada, bayangkan saja pelatihan di adakan pada awal-awal pembentukan BUMG di Gampong kita, dan sampai saat ini belum ada pelatihan-pelatihan lagi. Padahal pelatihan tersebut sangat penting sebagai penguatan kapasitas serta peningkatan kualitas sumber daya pengelola BUMG”.⁷⁰

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Salman sebagai bendahara BUMG:

“Faktor penghambat kalau di organisasi BUMG kita kekurangan ilmu ya, atau pelatihan. Pelatihan pernah di adakan tapi cuma sekali, itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu lah. Kalau menurut saya, pelatihan itu perlu sering diadakan, karena untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan internal dari BUMG”.⁷¹

Dari pemaparan wawancara di atas, salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG adalah terkait sumber daya manusia yang intinya terletak di kepengurusan BUMG. BUMG kekurangan sumber daya yang bermutu, berpendidikan serta tidak mempunyai pengalaman dalam menjalankan usaha. Hal

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muzahar selaku Sekretaris Gampong Alue Sungai Pinang pada tanggal 15 Agustus 2019

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Salaman sebagai Bendahara BUMG Alue Sungai Pinang pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 16:00 WIB

tersebut pastinya menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG serta memperlambat kemajuan BUMG. Namun, walaupun terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar dalam setiap kegiatan. Faktor penghambat bukanlah menjadi hal yang buruk dalam pengelolaan BUMG, namun di jadikan sebagai motivasi agar semakin meningkatkan penguatan sumber daya manusia agar kinerjanya ke depan semakin lebih baik lagi dalam menopang peningkatan kemajuan BUMG.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti selama berada di lapangan bersama pengelola/pengurus BUMG, aparatur gampong, dan masyarakat gampong Alue Sungai Pinang, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam pelaksanaannya pengelolaan BUMG di gampong Alue Sungai Pinang secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti perencanaan usaha yang masih kurang maksimal, hal ini dapat di lihat dari beberapa kegiatan yang di laksanakan BUMG. Seperti, pelatihan kursus menjahit dengan jadwal yang tidak teratur, kemudian pengelolaan unit usah sawah yang di sewakan kepada masyarakat di anggap tidak bergilir secara rata.
2. Kurangnya optimalisasi SDM atau pengelola BUMG, seperti kurangnya pelatihan yang didapat oleh pengelola BUMG padahal dengan adanya pelatihan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menambah pengetahuan pengelolaa BUMG agar bias berbenah diri terhadap kemajuan BUMG, seperti yang diketahui pengelola BUMG bukan berlata belakang dengan pendidikan ekonomi, manajemen, ataupun bisnis dan mereka juga belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha. Dan terkait laporan keuangan yang masih menggunakan sistem pembukuan manual.

3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat baik itu dari pemerintahan gampong maupun dari pihak pengelola BUMG, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak paham dengan BUMG bahkan ada yang tidak mengetahui tentang BUMG. Hal ini menyebabkan masyarakat masih belum antusias dalam kegiatan BUMG.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa beberapa saran antara lain :

1. Aparatur gampong serta masyarakat harus merekrut pengelola atau pengurus BUMG dengan melihat keahlian bidang masing-masing, serta memiliki pendidikan atau minimal memiliki pengalaman kerja dalam mengelola usaha. Sehingga kedepannya BUMG dapat dikelola dengan lebih baik lagi, untuk kemajuan BUMG.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait BUMG, agar masyarakat tidak gagal paham dalam mengenal BUMG. Dengan adanya sosialisasi, mungkin masyarakat dapat menyambut dengan antusias setiap kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan.
3. BUMG harus memperhatikan potensi gampong yang bisa dijadikan peluang usaha, bukan hanya berorientasi pada kebutuhan saja, dan di harapkan ke depannya setiap program BUMG perencanaannya harus lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Fathoni, Abdurrahman. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.2006
- Henki Idris Issakh,MM. *Pengantar Manajemen (edisi ke-2)*. In Media. 2015
- Hery. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gava Media. 2017
- Ibrahim, M.Sc. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di KawasanTambang*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.2018
- Juhaya. *Manajemen Perusahaan*. Bandung : CV Pustaka Setia.2014
- Kushandajani. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (dalam perspektif UU. No 6 tahun 2014 tentang Desa)*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. 2018
- Marjuni, Sukmawati. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar :CV Sah Media. 2015
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 2015
- Mustafa, Zainuddin.*Perilaku Organisasi Dalam Perspektif Manajemen Organisasi*. Jakarta: Media Perkasa. 2018
- Nurdin Batjo dan Mahadin Shaleh. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Makassar:Aksara Timur. 2018
- Patilima, Hamid. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2013
- Siswanto M,Si. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.2014
- Riniwati, Harsuko. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM)*. Malang: UB Press. 2016
- Rusdiana,.,*Asas-asas Manajemen berwawasan Global*. Bandung : CV Pustaka Setia.2014
- Syukron,Amin. *Pengantar Manajemen Industri*. Yogyakarta : Graha Ilmu 2014

Salihin, Ismail. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga. 2009

Sukasmanto. *Rancang Bangun Bisnis Dari Pengelolaan BUMDes*. Yogyakarta. Forum Pengembangan Desa (FPPD). 2014

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : ALFABETA. 2017

.Ulum, Chazienul. *Perilaku Organisasi Menuju Pemberdayaan*. Malang : UB Press. 2016

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Perilaku organisasi (kajian teoritik dan empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen*. Malang: UB Press. 2014

Zulganef. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013

PERUNDANG-UNDANGAN :

Profil Gampong Alue Sungai Pinang

Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Qanun Gampong Alue Sungai Pinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMG

RPJM Gampong Alue Sungai Pinang Tahun 2015-2021

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

JURNAL :

<http://aceh.tribunnews.com/2019/04/10/tim-kabupaten-nilai-delapan-gampong-di-abdya-kecamatan-babahrot-tak-ada-wakil> diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

Eprint.unsy.ac.id. Erny Lindhawati (2008). *Pengelolaan Usaha Konveksi Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten* di Akses pada tanggal 11 Maret 2019.

- Ejournal.unisnu.ac.id. Edy Yusuf Agunggunanto DKK. Pengembangan Desa mandiri melalui pengelolaan BUMDes. Universitas Diponegoro Semarang. Di akses pada tanggal 13 Maret 2019.
- Ejournal.unsrat.ac.id. Jeli Koso, Martha Ogota dan Rully Mambo. Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Di akses pada tanggal 12 April 2019.
- Ejournal3.undip.ac.id. Ahmad Nur Ikhsan. Analisis Pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera sebagai penggerak Desa wisata Lereng. Di akses pada tanggal 13 Maret 2019.
- Jurnal.uns.ac.id. Amelia Sri Kusuma Dewi (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta menumbuhkan perekonomian Desa. Di akses pada tanggal 13 Maret 2019.
- Jurnal.ar-raniry.ac.id. Siti Nur Zalikha. Demokrasi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa. Di akses pada tanggal 29 Maret 2019.
- Mirawati, skripsi "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*". jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang 2018 Di akses pada tanggal 11 Maret 2019.
- Tedi Kusuma, skripsi "*pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karya Mandiri Sejati*". Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2018. Di akses pada tanggal 11 Maret 2019.
- Yeni Fajar Wati, skripsi "*Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*".Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng, Serang 2016 Di akses pada tanggal 11 Maret 2019.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 93/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munagasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Mahmuddin, M.Si sebagai pembimbing pertama
2. Siti Nur Zalikha, M.Si sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
Nama : Sri Novi Sulvia
NIM : 150802041
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapeu Pakat Di Gampong Aieu Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Februari 2019



Tersusun

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry
3. Prodi yang bersangkutan untuk ditandatangani dan diarsipkan
4. yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1676/Un.08/FISIP/PP.00.9/08/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 Agustus 2019

Kepada Yth,

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Sri Novi Sulvia
NIM : 150802041
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Alue Sugai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya.
Lokasi Penelitian : Badan Usaha Milik Gampong Alue Sugai Pinang Kecamatan Jeumpa.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewit



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN JEUMPA
GAMpong ALUE SUNGAI PINANG
Jalan Nasional Blangpidie – Nagan Raya Kode Pos 23764

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : *198/ JJ / 2019*

Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Novi Sulvia
NIM : 150802041
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat Sekarang : Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

Benar yang tersebut namanya diatas, telah melakukan penelitian dengan Judul (**Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya**). Dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2019.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Dikeluarkan di : Alue Sungai Pinang
Pada Tanggal : 11 November 2019
Keuchik Gampong

M. DAUD SYAH

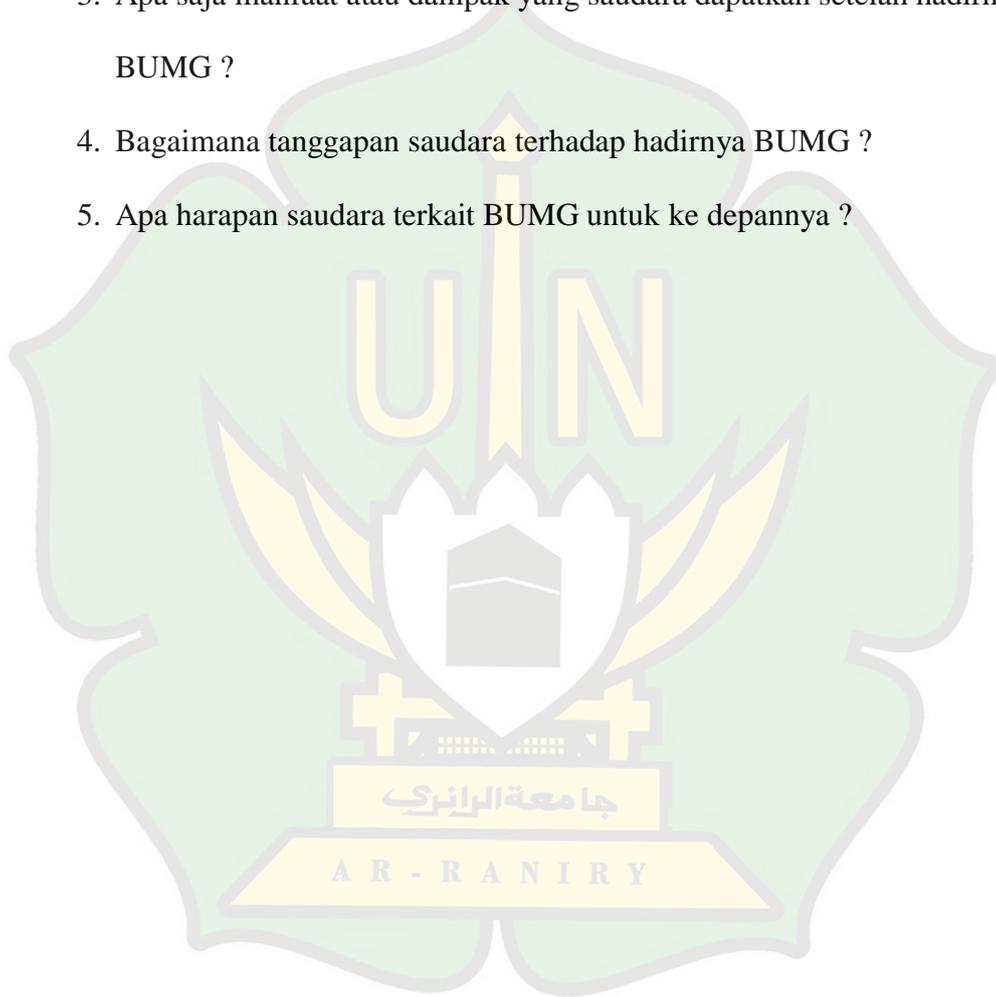


PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PENGELOLA BUMG

1. Bagaimana awal mula pembentukan BUMG ?
2. Apa saja barang dan jasa yang ditawarkan oleh BUMG ?
3. Bagaimana tahap atau alur dalam penentuan jenis usaha BUMG ?
4. Apa saja hukum yang mandasari pembentukan BUMG di Gampong Alue Sungai Pinang ?
5. Berapa jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk BUMG setiap tahunnya ?
6. Apakah ada penyusunan rencana produksi, keuangan, fasilitas, pemasaran dan sumber daya manusia ?
7. Apakah masalah masyarakat dapat diatasi dengan hadirnya BUMG ?
8. Apakah setiap jenis usaha sudah dikelola dengan baik ?
10. Apakah laporan keuangan BUMG sudah cukup transparan ?
11. Berapa keuntungan yang didapat setiap tahunnya ?
12. Bagaimana dengan pembagian laba/lkeuntungan BUMG ?
13. Apakah BUMG *Sapeu pakat* pernah mengalami kerugian ?
14. Bagaimana dengan sistem penggajian pengurus BUMG ?
15. Apa saja yang menjadi hambatan dalam mengelola usaha BUMG ?
16. Apa saja manfaat untuk masyarakat dari unit usaha yang telah berjalan ?
17. Apakah pengelola BUMG mendapatkan pelatihan atau bimbingan?
18. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMG ?
21. Apakah pengelolaan BUMG sudah berjalan optimal ?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

1. Apakah saudara mengetahui tentang BUMG ?
2. Apakah saudara pernah menyewa atau barang atau jasa yang ditawarkan oleh BUMG ?
3. Apa saja manfaat atau dampak yang saudara dapatkan setelah hadirnya BUMG ?
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap hadirnya BUMG ?
5. Apa harapan saudara terkait BUMG untuk ke depannya ?



DOKUMENTASI PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama :Sri Novi Sulvia
Tempat, Tanggal Lahir :AS.Pinang, 5 November 1997
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
Status :Belum Kawin
Alamat :AS.Pinang, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya
No.Hp :0853-5883-2254
Email :srinovisulvia97@gmail.com

Nama Orang Tua
Ayah :Rusli
Pekerjaan :Petani
Ibu :Siti Sara
Pekerjaan :IRT جامعة الرانيري
Alamat :AS.Pinang, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya

Riwayat Pendidikan

SD :SDN 2 AS.Pinang
SMP :SMP N 1 Blangpidie
SMA :MAN 1 Blangpidie
Universitas :UIN Ar-Raniry Banda Aceh